

INVENTARIS ARSIP
DEPARTEMENT VAN BINNENLANDSCH BESTUUR:
SERIE TOEGANGEN
1849-1950



DIREKTORAT PENGOLAHAN
DEPUTI BIDANG KONSERVASI ARSIP
ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
JAKARTA, 2023

KATA PENGANTAR

Pasal 19 ayat 2 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan menyatakan bahwa Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) wajib melakukan pengolahan arsip statis berskala nasional yang diterima dari lembaga negara, perusahaan, organisasi sosial politik, organisasi kemasyarakatan, dan perorangan. Pengelolaan arsip statis oleh Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) bertujuan untuk menjamin keselamatan dan keamanan arsip sebagai bukti pertanggungjawaban nasional dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Arsip statis di ANRI merupakan memori kolektif, identitas bangsa, bahan penelitian, dan sumber pengetahuan. Oleh karena itu, untuk meningkatkan akses arsip statis, khazanah arsip statis di ANRI harus diolah dengan benar berdasarkan kaidah-kaidah kearsipan. Berkaitan dengan hal itu, maka Direktorat Pengolahan ANRI pada Tahun Anggaran 2023 melaksanakan penyusunan Inventaris Arsip *Binnenlandsch Bestuur: Serie Toegangen 1849-1950*.

Inventaris arsip ini belum menggambarkan keseluruhan khazanah arsip *Binnenlandsch Bestuur* yang tersimpan di ANRI. Meskipun demikian, Inventaris arsip ini sudah dapat digunakan untuk mengakses arsip *Binnenlandsch Bestuur: Serie Toegangen 1849-1950* yang tersimpan di ANRI dalam rangka pelayanan arsip statis.

Akhirnya, kami ucapkan banyak terima kasih kepada segenap Pimpinan ANRI, anggota tim, dan semua pihak yang telah membantu penyusunan inventaris arsip ini. Semoga Allah SWT/Tuhan Yang Maha Esa membalas semua perbuatan baik yang telah diberikan. Amin.

Jakarta, Desember 2023

Direktur Pengolahan



Wiwi Diana Sari, S.Si, M.A.

TIM KERJA

Penanggung Jawab Program

Wiwi Diana Sari, S.Si, M.A.

Penanggung Jawab Teknis

Jajang Nurjaman, S.Hum, M.A.

Koordinator

Bertha Jayanti Nurtiana, S.Hum.

Sekretaris

Monica Imanuela Bendatu, S.S

Anggota

Arshanti Kurnianingrum, S.Sos.

Fahad Rizal Ilhamsyah, S.S.

Alfathan Wira Saputra, S.Hum.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
TIM KERJA	iii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Riwayat Organisasi.....	5
1.3. Riwayat Arsip.....	29
1.3.1. Sistem Penataan.....	29
1.3.2. Jenis dan Periode.....	30
1.4. Pertanggungjawaban Pembuatan Inventaris	40
1.5. Petunjuk Penggunaan	41
1.5.1. Petunjuk Penggunaan Arsip	41
1.5.2. Petunjuk Penggunaan Inventaris	42
1.5.3. Ketentuan reproduksi arsip.....	43
1.5.4. Petunjuk Kutipan Sumber Arsip	43
BAB II.....	45
2.1. Agenda.....	45
2.1.1. Inkomende Agenda	45
2.1.2. Uitgaande Agenda.....	46
2.1.3. In –en Uitgaande Agenda.....	47
2.1.4. Correspondentiekaart	47
2.2. Index	51
2.3. Klapper	52
2.3.1. Klapper Index.....	52
2.3.2. Agenda Klapper	53
2.4. Controleboeken	53
2.4.1. Controle Agenda	53
2.4.2. Controle Index.....	53
2.4.3. Autoriteiten	53
2.4.4. Register Antwoord	54
2.5. Expeditie Boek	55
2.5.1. Afdeling A.....	55

2.5.2.	Afdeeling AI.....	56
2.5.3.	Afdeeling AJ	56
2.5.4.	Algemeene Politie	56
2.5.5.	Afdeeling AVB	56
2.5.6.	Afdeeling B	56
2.5.7.	Afdeeling BG	57
2.5.8.	Afdeeling BR	57
2.5.9.	Afdeeling BTB	57
2.5.10.	Afdeeling C1	57
2.5.11.	Afdeeling C2	57
2.5.12.	Afdeeling C	58
2.5.13.	Afdeeling CD	58
2.5.14.	Afdeeling CK	58
2.5.15.	Afdeeling CZ.....	58
2.5.16.	Afdeeling D	58
2.5.18.	Afdeeling E.....	59
2.5.19.	Afdeeling F.....	59
2.5.20.	Afdeeling Gewapende Politie.....	60
2.5.21.	Afdeeling H	60
2.5.22.	Afdeeling Japansche Zaken.....	60
2.5.23.	Afdeeling MAT	60
2.5.24.	Afdeeling MP	60
2.5.25.	Afdeeling OAZ.....	60
2.5.26.	Afdeeling Politie.....	60
2.5.27.	Afdeeling R	61
2.5.28.	Afdeeling SAL	61
2.5.29.	Afdeeling VCW.....	61
2.5.30.	Unidentified Afdeeling.....	61
PENUTUP.....		63
DAFTAR PUSTAKA.....		64

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kemunduran Perusahaan Dagang Hindia Timur (*Vereenigde Oost-Indische Compagnie*, VOC [1602-1799]) akibat persaingan dagang, peperangan dan korupsi yang meluas, mengakibatkan hilangnya sebagian besar imperium perdagangan Belanda yang terbentang dari Afrika Selatan, sepanjang pantai Afrika Timur, anak benua India, kepulauan Nusantara hingga Jepang.¹ Proses kolonisasi formal di kepulauan Indonesia dimulai dengan pengambilalihan secara bertahap wilayah-wilayah yang dikuasai VOC oleh Pemerintah Belanda pada 1799-1808 (Republik Bataaf di bawah penguasa demokratik), 1808-1811 (Kerajaan Belanda di bawah Perancis), dan kemudian dikuasai Inggris (*British Interregnum*, 1811-1816), dan kian menampakkan bentuk kekuasaannya di Nusantara pada pertengahan abad ke-19.²

Dalam proses yang panjang, pembentukan negara kolonial Hindia Belanda (*Pax Nederlandica*) berlangsung secara eksternal dan internal. Penegasan secara eksternal berlangsung selama abad ke-19 melalui serangkaian perjanjian perbatasan yang beririsan dengan penguasa kolonial Inggris,

¹ Di sini Jepang bukan sebagai wilayah jajahan Belanda tetapi sebagai salah satu kantor dagang VOC, tepatnya di kota Nagasaki. Keterangan tersebut sudah dijelaskan di awal kalimat, "...hilangnya sebagian besar imperium perdagangan Belanda...". Mengenai sejarah hubungan Kekaisaran Jepang dan Belanda melalui VOC dapat baca selengkapnya di: Abdul Wahid, *The Dutch's 'Floating Life' On Deshima Island: A Gloomy Side Of Dutch-Japan Relationship During The Tokugawa Periode, 1715-1790*" Jurnal Kajian Wilayah Vol.6 No.1, 2015, Jakarta: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, hlm.2.

² Pada 1795 Pangeran Oranye, stadhouder atau penguasa Belanda diturunkan dari jabatannya melalui revolusi oleh para pemimpin gerakan demokratik. Di saat yang sama, pasukan Republik Bataaf kalah perang dari Perancis. Akibatnya Pangeran Oranye meminta perlindungan Inggris. Sementara itu, pemerintah Belanda yang di bawah pemimpin demokratik menyepakati persekutuan dengan Perancis. Sehingga sejak 1796-1810 Belanda berada di bawah kekuasaan Perancis. Meski begitu, pemindahan kekuasaan di Hindia Belanda tidak serta merta terjadi. Pada 1796 para Direktur kompeni menyerahkan administrasi VOC pada pemerintah Belanda melalui Komite Urusan Hindia Timur. Melalui penyerahan tersebut pemerintah Belanda memutuskan untuk tidak memperbarui perjanjian dagang VOC pada 31 Desember 1799. Baru setelah Louis Napoleon menjadi Raja di Belanda tahun 1806, serta mengirim H.W. Daendels untuk berkuasa sejak 1808, secara resmi Hindia Belanda merupakan bagian dari Perancis. Baca selengkapnya di: Bernard H.M. Vlekke, *Nusantara Sejarah Indonesia*, 2018, Jakarta: KPG (Kepustakaan Populer Gramedia), hlm.220-226.)

Spanyol, Portugis, dan Jerman di kawasan Asia Tenggara dan Pasifik, dan secara internal, perjanjian-perjanjian politik dengan kerajaan-kerajaan independen Nusantara ke dalam hegemoni Belanda yang diselesaikan secara bertahap melalui jalur militer maupun diplomatik. Setelah mengamankan wilayah-wilayah Nusantara ke dalam kekuasaan, administrasi pemerintahan kolonial diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan ekonomi ekstraktif-eksploitatif melalui sistem tanam-paksa (*cultuurstelsel*, 1830-1870). Ekstraktif dalam hal menguras secara ekstra baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia demi tujuan eksploitasi ekonomi. (Howard W. Dick, 2002, hlm.75)

Penegasan kekuasaan secara langsung ditunjukkan oleh Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels (selanjutnya disebut H.W. Daendels, berkuasa pada tahun 1808-1811) dengan membagi wilayah Jawa menjadi 9 prefektur dan 30 kabupaten (*gewesten*).³ Pada periode kekuasaan Inggris, Thomas Stamford Raffles (berkuasa pada 1811-1815, dan selanjutnya disebut T.S. Raffles) membagi Jawa ke dalam 17 wilayah karesidenan,⁴ serta menghapuskan batas-batas wilayah tradisional.⁵ Setelah itu, menempatkan pejabat Eropa di samping penguasa lokal di bawah kendali langsung Batavia secara terpusat melalui sistem gaji (Sutherland, 1983: 35).

Pembagian wilayah administrasi tersebut pada akhirnya dapat dikaitkan secara langsung dengan upaya pengelolaan ekonomi pemerintah kolonial (*cultuurstelsel*) yang berlangsung mulai periode 1830-1870, yaitu sedari masa Gubernur Jenderal Johannes van den Bosch (berkuasa pada tahun 1830-1833)

³ Lima prefektur ini merupakan pecahan dari Provinsi Java's Nord Oost Kust. (Inventaris Arsip Java's Noordoost Kust 1694-1816: 10).

⁴ Menurut catatan T.S. Raffles pada Tabel II "Jumlah Penduduk di Jawa dan Madura, berdasarkan sensus Pemerintah Inggris di Tahun 1815", diperoleh sejumlah provinsi milik Pemerintah Eropa yaitu: 1. Bantam; 2. Batavia dan sekitarnya; 3. Buitenzorg; 4. Regensi Priangan; 5. Cheribon; 6. Tegal; 7. Pekalong'an (Pekalongan); 8. Semarang; 9. Kedu; 10. Grobogan dan Jipang; 11. Japara (Jepara) dan Juwana; 12. Rembang; 13. Gresik; 14. Surabaya; 15. Pasuruan; 16. Proboling'go; 17. Banyuwangi. (Raffles, 2014: 36-37).

⁵ Wilayah yang dimaksud di sini berkaitan dengan nilai tradisi, yang mana sebelumnya bupati sebagai penguasa wilayah yang merupakan perwakilan raja, sejak wilayahnya jatuh ke dalam administrasi kolonial menjadi semacam jabatan pegawai yang digaji, seperti diilustrasikan T.S. Raffles. (Raffles, 2014: 174).

sampai masa Gubernur Jenderal Pieter Mijer (berkuasa pada tahun 1866-1872).⁶ Eksploitasi kolonial melalui penanaman secara paksa komoditas-komoditas perkebunan yang laku di pasaran dunia seperti tebu, kopi, dan indigo, berlangsung dengan melibatkan penguasa lokal dan diadministrasikan secara birokratis melalui lembaga *Directie der Cultures en Landelijke Inkomsten*, Direktorat Budidaya Tanaman dan Pendapatan Negeri.

Pembukaan investasi swasta (Eropa) di Jawa menandai penghapusan secara bertahap perkebunan pemerintah dan dengan demikian menjadi akhir dari proyek besar *cultuurstelsel*. Perusahaan-perusahaan swasta Barat menandai liberalisasi ekonomi kolonial (1870-1901) dengan mengintensifkan lahan-lahan di Jawa, mulai merambah wilayah luar dengan budi daya tembakau diikuti oleh komoditas lainnya seperti kopi dan karet di Sumatera (Pelzer, 1985: 73).

Kebijakan eksploitasi yang memakan korban besar dan menimbulkan reaksi di kalangan pribumi maupun kolonial golongan liberal di negara induk berujung pada penerapan Politik Etis (*Etische Politiek*) bagi wilayah dan penduduk koloni. Untuk mendukung pelaksanaan Politik Etis ini, pada 1902 dibentuklah suatu komisi yang diberi nama *De Mindere Welvaart Commissie*, Komisi Kemakmuran bagi Rakyat Kecil, dengan tugas menyelidiki sebab-sebab kemelaratan rakyat. Penerapan Politik Etis melalui Program Irigasi, Edukasi, dan Emigrasi membuka intervensi negara secara langsung dalam kehidupan ekonomi dan sosial warga pribumi. Program-program yang bertujuan ganda: irigasi yang lebih baik akan mengurangi kemiskinan warga Jawa akan mengurangi tekanan penduduk yang penuh sesak di Jawa dan Madura; edukasi/pendidikan yang lebih baik membuka peluang untuk menyebarkan peradaban Barat sekaligus melatih tenaga kerja terampil untuk bekerja untuk perusahaan kolonial (Dick, 2002: 118).

Perkembangan-perkembangan tersebut membuka mata penguasa kolonial bahwa mengurus negara, tidak semata mengatur eksploitasi dan pendapatan, alih-alih dihadapkan pada permasalahan demografis, infrastruktur

⁶ Mengenai Daftar Gubernur Jenderal dan tahun berkuasanya ada dalam catatan di buku *Nusantara Sejarah Indonesia* karya Bernard H.M. Vlekke.

maupun dinamika pertahanan, keamanan dan ketertiban umum. Berdasarkan Keputusan Raja Belanda (*Koninklijk Besluit*) tanggal 21 September 1866 (*Indische Staatsblad*. No. 127) pemerintah kolonial mendapatkan mandat untuk meningkatkan fungsi pengelolaan negara yang tidak terkait langsung dengan pengelolaan sumber daya daerah jajahan dengan mendirikan empat *Departementen van Algemeen Bestuur* (Departemen Pemerintahan Umum), yakni:

1. *Departement van Binnenlandsch Bestuur* (Pemerintahan Dalam Negeri);
2. *Departement van Onderwijs, Eredienst en Nijverheid* (Pendidikan, Ibadah, dan Industri Kerajinan);
3. *Departement van Burgerlijke Openbare Werken* (Pekerjaan Umum Sipil); dan
4. *Departement van Financiën* (Keuangan).

Awalnya, pengaruh badan-badan pemerintah pusat terbatas. Penerapan Politik Etis, memaksa pemerintah dalam negeri melakukan kerja sama dan mengawasi pegawai pemerintah Eropa dan Pribumi, dan melakukan penjalinan hubungan dengan *inlandse vorsten en groten* (raja-raja dan para petinggi pribumi). Hingga menjelang masa akhir pemerintahan kolonial Hindia Belanda, telah tercipta atau terlaksana penataan ulang departemen yang khusus mengurus masalah-masalah spesifik sesuai mandat pelaksanaan politik etis seperti pengadilan (*Departement van Justitie*, 1870), keuangan, pendidikan dan agama, ekonomi, perhubungan, pengairan, dan urusan perang. Departemen lainnya adalah Departemen Pertanian, Perdagangan dan Industri (*Departement van Landbouw, Nijverheid*, 1904), Departemen Pekerjaan Umum Sipil (*Departement van Burgerlijke Openbare Werken*, 1908) dan Departemen Pendidikan (*Departement van Onderwijs*, 1908). Terdapat juga lembaga spesialis baru termasuk Penyuluhan Dinas Pertanian (*Landbouwvoorlichtingsdienst*, 1910), Dinas Pelayanan Medis Sipil (*Burgerlijke Geneeskundige Dienst*, 1911) dan Bank Perkreditan Rakyat (*Volkskredietwezen*, 1912) (Anrooij, 2009; Dick, 2002: 118).

Departement van Binnenlandsch Bestuur (berdiri tahun 1866) sebagai departemen yang mengurus kebijakan berkaitan langsung dengan hubungan antara pemerintah kolonial dan penduduk jajahannya. Oleh karenanya, departemen ini menjadi salah satu kunci penting dalam tonggak sejarah Indonesia. Pentingnya kedudukan departemen ini pada masa kolonial, membuat minat pengguna terhadap arsip *Departement van Binnenlandsch Bestuur* begitu tinggi, dan hal ini menjadi landasan bagi Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) khususnya Direktorat Pengolahan untuk mengolah arsip tersebut. Meskipun sudah terdapat Daftar Arsip *Departement van Binnenlandsch Bestuur* yang disusun pada 1988, tetapi belum ada inventaris arsip *Departement van Binnenlandsch Bestuur* yang komprehensif. Hal ini menyebabkan kurangnya informasi mengenai sejarah lembaga *Departement van Binnenlandsch Bestuur*, juga jenis informasi apa saja yang terkandung dalam khazanahnya, termasuk di dalamnya sistem arsip yang digunakan. Penyusunan Inventaris Arsip *Departement van Binnenlandsch Bestuur: Serie Toegangen 1849-1950* merupakan kelanjutan dari penyusunan sarana penemuan kembali arsip *Departement van Binnenlandsch Bestuur* sejak tahun 2015.

1.2. Riwayat Organisasi

Cultuurstelsel atau sistem tanam paksa adalah kebijakan Pemerintah Kolonial agar wilayah kekuasaannya mengusahakan penanaman tanaman ekspor. Sistem ini dianggap sebagai tonggak penjajahan yang sebenarnya.⁷ Secara politik melalui perang Diponegoro, Jawa (dan Madura) telah jatuh ke tangan Pemerintah Kolonial Belanda. Sebagai akibat dari perang Jawa, berbagai wilayah kekuasaan dari keraton-keraton pecahan Mataram secara resmi jatuh ke tangan Pemerintah Kolonial Hindia Belanda. Kabupaten-kabupaten yang dulunya dikuasai oleh keraton, pasca perang Jawa resmi berada di bawah administrasi Pemerintah kolonial. Perang Jawa sendiri telah menguras kas negeri Belanda. Sedari masa mulainya Perang Jawa, Pemerintah Kolonial telah

⁷ Ricklefs, M.C., Sejarah Indonesia Modern : 259.

memikirkan untuk melakukan eksploitasi di Jawa. Berdasarkan keadaan inilah kemudian mulai diterapkan *cultuurstelsel*, yang diprakarsai oleh Gubernur Jenderal Johannes van den Bosch pada tahun 1830.

Di satu sisi, pada tahun 1830, Belgia, sebagai wilayah subur Belanda, pun berusaha melepaskan diri dari Belanda. Peperangan dan lepasnya Belgia ini semakin menguras kas negeri Belanda. Sehingga *cultuurstelsel* dianggap sebagai solusi dari menambal dan menambah kas negeri induk yang terguncang oleh perang-perang di masa tersebut.

Pemerintah Hindia Belanda menciptakan atau membentuk kembali beberapa lembaga untuk mendukung kebijakan-kebijakan kolonial. Penerapan politik tanam paksa (*cultuurstelsel*) dan pengumpulan sewa tanah (*landrente*) dibebankan pada kepala daerah (bupati) yang pada gilirannya bertanggung jawab kepada pengawas Eropa (*controleur*). Hubungan-hubungan ini membentuk kompleksitas birokrasi kolonial hingga tingkat desa melalui pelembagaan jabatan gubernur, residen, asisten residen hingga *controleur* yang berfungsi untuk mengawasi penguasa pribumi (bupati dan wedana) sebagai upaya menjaga keberlangsungan politik ekstraktif-eksploitatif kolonial.

Sistem tersebut dikenal dengan dualisme sistem birokrasi politik: sistem administrasi Eropa modern (*Europeese Bestuur*) dan sistem tradisional (*Inheemsche Bestuur*) dengan mempertahankan bahkan menjalin hubungan dengan elit politik setempat tanpa mengubah struktur kekuasaan tradisional yang ada hingga unit politik terkecil desa (Hugenholtz, 1991).

Keberhasilan sistem tanam paksa atau *cultuurstelsel* (1830-1870) membuat wilayah koloni, dalam hal ini Nusantara, menjadi daya tarik tersendiri bagi negara induk. Kaum liberal di negara induk turut pula meminta “jatah kesejahteraan”. Hal ini berimplikasi pada kebijakan ekonomi liberal yang diterapkan di Hindia Belanda. Kebijakan ekonomi ini diwujudkan *melalui Agrarische Wet. Agrarische Wet* yang disahkan pada tahun 1870 memiliki dampak mulai dibukanya perkebunan-perkebunan milik swasta. Dengan begitu, semakin banyak pula pendatang bangsa Eropa (Kartodirdjo, 1999: 22).

Dalam suasana politik seperti itulah dibentuk sebuah organisasi yang

melaksanakan pengadministrasian pemerintahan kolonial sekaligus menjalankan fungsi pencatatan pendapatan ekonomi, yakni pembentukan *Departement van Binnenlandsch Bestuur* (BB).

Pada awalnya BB mengemban mandat dan melanjutkan fungsi *Directie der Cultures en Landelijke Inkomsten* (Direktorat Budidaya Tanaman dan Pendapatan Negeri) semasa *Cultuurstelsel* (Sistem Tanam Paksa). Patut diketahui, Direktorat ini beroperasi di tahun 1830 sampai dengan tahun 1866, yakni ketika saat itu pemerintah bertindak sebagai pengusaha, sehingga Direktorat ini terutama mengurus tentang perkebunan dari sistem penanaman, komoditi, sampai dengan distribusi. Oleh karenanya setelah dibentuknya BB, departemen ini memiliki tugas. Beberapa tugas utama (substansif) dari *Departement van Binnenlandsch Bestuur* yakni sebagai berikut:⁸

1. Pengelolaan budi daya tanaman pemerintah (*Afdeeling de gouvernementcultures*)
 - a. Pertanian (*meer in het algemeen de landbouw*),
 - b. Peternakan (*de veeteelt*),
 - c. Perkebunan dan tenaga kerja paksa (*het bosbeheer en de herendiensten*)
2. Penyewaan lahan pemerintah untuk kalangan swasta (*Het verhuren van gouvernementgronden (aan particuliere ondernemers)*)
3. Pengukuran tanah dan pencacahan (*Kadastrale aangelegenheden en statistiek*)
4. Penyimpanan dan penjualan produksi (*De opslag en verkoop van gouvernementproducten*)
5. Pengelolaan gudang-gudang pemerintah (*Het beheer van 's lands pakhuizen*)
6. Surat pos berkuda (*De brieven-en paardenposterij*)
7. Pos/Paket laut (*De pakketvaart*)

⁸ Berdasarkan hasil rekonstruksi yang dilaksanakan oleh tim pengolahan, merujuk pula pada Daftar Arsip *Binnenlandsch Bestuur* pertama (ANRI, 1988) dan panduan penelitian arsip di Arsip Nasional Belanda, Den Haag (Aanroij, 2009),

8. Pengangkutan pegawai pemerintah (*Het vervoer van gouvernementsreizigers*)
9. Tentara pribumi (*Schutterijen en inlandse korpsen*)
10. Pegadaian dan perbudakan karena terjerat hutang (*Het pandelingschap, schuldslavernij*)
11. Pemberantasan perompak (*Zeeroverij*)
12. Barang rampasan terdampar (*Strandvonderij*)
13. Pemberantasan hama harimau dan buaya (*Deuitroeiing van tijgers en krokodillen*).

Tahun 1870 muncul *Agrarische Wet* atau undang-undang Agraria. Undang-undang ini membuka kesempatan bagi pengusaha swasta untuk lebih menggerakkan roda perekonomian, terutama berkaitan dengan perkebunan, dari masalah budidaya, sistem sewa tanah untuk perkebunan, hingga distribusi hasil perkebunan di Hindia Belanda. Kebutuhan akan hal tersebut menjadikan BB turut juga mengelola sumber daya manusia untuk mengurus berbagai hal tersebut. Di sisi lain, permasalahan mengenai perbudakan, pemberantasan perompak, dan barang rampasan terdampar kemudian menjadi bagian dari *Departemen van Justitie*.

Era ekonomi liberal sejak diberlakukannya *Agrarische Wet*, mengundang kedatangan lebih banyak bangsa Eropa pada kurun tahun 1860an-1870an. Hal ini menjadi polemik tersendiri bagi pemerintah kolonial di Hindia Belanda. Di satu sisi, pemerintah kolonial mendapat keuntungan dengan kenaikan pajak khusus untuk orang Eropa. Selain itu juga naiknya kas negara dengan masuknya investasi terhadap perkebunan yang meningkat drastis, dan perkembangan-perkembangan komoditi ekspor di pasar internasional. Namun, kedatangan tersebut memiliki dua sisi mata uang. Tidak hanya keberhasilan dan kesuksesan meningkatkan komoditi ekspor untuk perkembangan ekonomi negara, terjadi peningkatan kejahatan karena gesekan sosial yang terjadi di masyarakat. Penduduk pribumi merasa mendapatkan saingan, begitu pula dengan penduduk Eropa yang merasa terancam dengan keberadaan pemimpin

lokal dari kalangan santri, terutama para haji putih atau kaum putihan menurut terminologi Clifford Geertz (Wertheim, 1999: 175).

Gesekan-gesekan yang timbul ini mencapai puncaknya pada pemberontakan petani di Banten pada 1888. Pemberontakan ini melibatkan lebih kurang 800 orang yang kebanyakan merupakan pengikut Naqsabandiyah.⁹ Pemberontakan ini telah terorganisir dan berencana menggulingkan pemerintah kolonial. Kejadian ini menyadarkan pemerintah kolonial tentang perlunya evaluasi kinerja aparat negara dalam bidang keamanan sipil, yakni kepolisian. Pengawasan wilayah terkecil melalui polisi desa dengan ronda-rondanya dinilai sudah tidak efektif lagi. Penyebab utamanya adalah beban kerja yang dirasa berat dengan upah yang rendah sehingga pada 1897 muncul pendapat mengenai reorganisasi kepolisian yang diusulkan Arends, Direktur *Departement van Binnenlandsch Bestuur* saat itu (Bloembergen, 2011: 37).¹⁰

Ekonomi liberal membuka mata Pemerintah Hindia Belanda akan kebutuhan mereka pada tanah (wilayah) yang semakin besar. Jawa dan Madura dianggap sudah tidak lagi mencukupi kebutuhan pemerintah akan tanah. Ada kebutuhan untuk memperluas wilayah yang nantinya digunakan sebagai wilayah perkebunan dan budidaya tanaman ekspor. Selain itu juga untuk melindungi perdagangan antar pulau melalui *Koninklijk Paketvaart Maatschappij*, atau KPM, perusahaan perkapalan milik Pemerintah Hindia Belanda. Hal ini berkaitan erat dengan kelancaran distribusi tanaman ekspor yang menjadi komoditi Hindia Belanda.¹¹ Sehingga, kebutuhan ini diwujudkan pemerintah kolonial dengan melakukan ekspansi kekuasaan melalui penaklukan-penaklukan wilayah luar Jawa dan Madura. Penaklukan ini berakhir pada tahun 1910 dengan takluknya Kesultanan Aceh. Sejak saat itu peran daerah luar Jawa sebagai penghasil komoditi menjadi lebih signifikan dari

⁹ Baca selengkapnya di Marieke Bloembergen, *Polisi Zaman Hindia Belanda Dari Kepedulian dan Ketakutan*, Jakarta: P.T. Kompas Media Nusantara, 2011, hlm. 37

¹⁰ Mengenai Sejarah Afdeeling Politi dapat dibaca selengkapnya dalam pendahuluan Inventaris Departement van Binnenlandsch Bestuur Afdeeling Politie.

¹¹ Mengenai distribusi tanaman perkebunan ini diurus oleh Afdeeling C Departement van BB saat masih berfungsi menjadi *Transporten*.

wilayah Jawa sendiri. (Ricklefs: hlm. 219). Untuk mengurus administrasi wilayah Hindia Belanda di luar Jawa dan Madura inilah, pertama-tama urusan *Bestuurszaken der Bezittingen* muncul pada tahun 1909.

Kemajuan ekonomi akibat ekonomi liberal ternyata tidak berbanding lurus dengan kemakmuran yang dirasakan oleh penduduk pribumi. Dari sisi penduduk pribumi, justru terjadi penurunan kesejahteraan karena kurangnya wilayah untuk ditanami tanaman pangan, terutama beras, serta persaingan perkebunan dengan orang Eropa. Turunnya kesejahteraan ini mendorong beberapa pihak untuk melakukan perbaikan nasib masyarakat pribumi. Gagasan perbaikan nasib ini dianggap sebagai hutang kehormatan pemerintah kolonial kepada masyarakat pribumi terutama di Jawa.

Gagasan ini kemudian memunculkan kebijakan politik etis pada awal 1900an. Untuk mendukung pelaksanaan Politik Etis ini, pada 1902 dibentuklah suatu komisi yang diberi nama *De Mindere Welvaart Commissie*, Komisi Kemakmuran bagi Rakyat Kecil, dengan tugas menyelidiki sebab-sebab kemelaratan rakyat. Penerapan Politik Etis melalui Program Irigasi, Edukasi, dan Emigrasi membuka intervensi negara secara langsung dalam kehidupan ekonomi dan sosial warga pribumi. Program-program yang bertujuan ganda: irigasi yang lebih baik akan mengurangi kemiskinan warga Jawa akan mengurangi tekanan penduduk yang penuh sesak di Jawa dan Madura; edukasi/pendidikan yang lebih baik membuka peluang untuk menyebarkan peradaban Barat sekaligus melatih tenaga kerja terampil untuk bekerja untuk perusahaan kolonial (Dick, 2002: 118). Berdasarkan *Regerings Almanak*, pada Departement van BB, urusan ini muncul tahun 1905 dengan nama *Welvaartonderzoek*. Selain itu berkenaan dengan pengawasan pekerja, salah satunya buruh perkebunan, berada dalam urusan *arbeidinspectie* di bawah *Afdeeling D*, yang baru terbentuk di tahun yang sama.

Awal abad XX adalah masa dari Pemerintah Kolonial untuk memperbaiki kesejahteraan penduduk koloninya. Salah satu hasil dari penelitian kesejahteraan adalah kenyataan bahwa penduduk pribumi, khususnya Jawa tidak memiliki perlindungan terhadap hasil pertanian mereka, sehingga ketika

terjadi musim paceklik penduduk tidak dapat mengatasi masalah ekonomi mereka, dan kerap kali terjebak pada rentenir Cina. Hal ini mendorong Pemerintah Kolonial membentuk lembaga perkreditan rakyat yakni lembaga kredit tani atau *landbouwcrediet*, yang menjadi bagian dari urusan Departement van BB sejak tahun 1906.¹² *Landbouwcrediet* ini kemudian berkembang menjadi *volkscredietwezen*. *Volkscredietwezen* sendiri merupakan sistem kredit yang merupakan bagian dari pelayanan kesejahteraan pemerintah. (Zanden: 219)

Politik Etis membuka peluang bagi masyarakat pribumi untuk berkembang. Melalui politik etis, pendidikan tidak hanya dinikmati oleh kaum bangsawan tinggi saja, melainkan dapat dinikmati oleh rakyat kebanyakan dengan penghasilan tertentu.¹³ Hal ini menciptakan golongan baru yakni priyayi rendah dari kalangan pribumi. Priyayi rendah inilah yang diharapkan pemikir politik Etis, salah satunya Snouck Hurgronje, untuk menggantikan pekerjaan-pekerjaan rendah pegawai Eropa. Sehingga diharapkan dengan adanya pegawai pribumi rendah ini kesejahteraan penduduk pribumi pun dapat meningkat.¹⁴ Dari sisi Departement van BB sendiri, untuk mengatur urusan kepegawaian orang pribumi merasa perlu dibentuk *Afdeeling D* pada tahun 1910.

Selain itu, hasil dari pendidikan bagi masyarakat pribumi adalah munculnya strata sosial baru yakni kaum *cendekiawan*. Strata sosial baru ini tidak termasuk dalam golongan bangsawan juga priyayi, tapi justru lebih cair karena lebih heterogen yang terdiri dari berbagai golongan, baik pribumi, Cina, Arab, maupun Indo.¹⁵ Golongan pemikir, seperti guru, dokter, pengacara, wartawan, dan profesi baru lainnya, ini mengambil peranan penting dalam dinamika politik Hindia Belanda. Di awal tahun 1900an mulai muncul cikal bakal perkumpulan maupun organisasi-organisasi yang nantinya turut membangun kesadaran tentang

¹² Lembaga perkreditan ini pertama kali muncul di Kota Purwokerto dalam bentuk *volksbanken* 1901. Baca selengkapnya di Jan Luiten van Zanden, Daan Marks, *Ekonomi Indonesia 1800-20120: Antara Drama dan Keajaiban Pertumbuhan*, Jakarta: P.T. Kompas Media Nusantara dan KITLV, 2012, hlm. 209.

¹³ Ricklefs : 330

¹⁴ Sutherland : 108

¹⁵ Heather Sutherland: 114-116

tanah air dan nasionalisme.

Di sisi lain, semakin luasnya wilayah koloni akibat dari ekspansi wilayah di luar Jawa-Madura, mengakibatkan banyaknya wilayah yang harus diurus secara administrasi. Undang-Undang Desentralisasi 1903 memberikan dasar hukum bagi perluasan kewenangan pengelolaan administrasi pemerintahan secara mandiri hingga tingkat daerah. Setelah 1905 pemerintah kota (*gemeente*) diciptakan di sebagian besar kota-kota utama dan kota-kota menengah, menyusul penciptaan dewan kabupaten di daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi administrasi dan secara bersamaan mengurangi beban pemerintah.

Pembentukan pemerintah kota dan dewan kabupaten kemudian dilanjutkan dengan *Administratie Ontwerp Bestuurshervorming* (Reformasi Birokrasi) pada 1914 dan empat tahun kemudian, *Ontvoogding* (Emansipasi) pada 1918 diterapkan dalam rangka memperluas kewenangan bagi pegawai pribumi. Emansipasi ini dipengaruhi oleh mulai banyaknya masyarakat bumiputera yang mengenyam pendidikan barat di Eropa, yang memungkinkan masuknya paham liberal, kajian kolonial, serta nasionalisme ke dalam pemikiran mereka. Kemudian setelah Perang Dunia pertama, yakni setelah tahun 1918, semakin banyak masyarakat bumiputera yang mengenyam pendidikan di Eropa. Pendidikan barat yang lebih progresif turut mempengaruhi pemikiran mahasiswa Hindia Belanda. Kesadaran akan rasial, nasionalisme di kalangan mereka. Sehingga ketika mereka pulang ke tanah air dan menjadi priyayi, kesadaran mengenai negeri koloni dan negeri induk muncul. Dari kalangan priyayi bumiputera ada pemikiran untuk memperbesar kewenangan pegawai bumiputera dalam roda pemerintahan.¹⁶ Kemudian pada 1922, reformasi pemerintahan kembali dilaksanakan dengan mengubah struktur sistem pemerintah daerah untuk menyambut tuntutan penyelesaian urusan rumah tangga negara secara mandiri. Konstitusi Hindia Belanda 1922 menyebutkan otonomi dalam lingkungan kerajaan memungkinkan

¹⁶ Vleke hlm: 338

pengaturan urusan internal secara umum. Perlu juga untuk dicatat, reformasi yang paling penting adalah pembentukan Dewan Rakyat (*Volksraad*) pada 1925 meskipun distribusi kursi masih tidak merata (Howard, 2002).

Perang Dunia pertama yang berlangsung di tahun 1914-1918 di daratan Eropa memiliki imbas secara tidak langsung di Hindia Belanda. Sulitnya distribusi barang dari Eropa masuk ke Hindia Belanda, mengakibatkan barang-barang impor dari Jepang mulai masuk membanjiri wilayah Hindia Belanda. Selain itu terjalin relasi antara Pemerintah Jepang dan Pemerintah Hindia Belanda. Oleh karenanya pada masa tersebut muncul *Afdeeling Japanasche Zaken* untuk mengawasi hal ini.

Masa ini juga muncul *Afdeeling Chinesche Zaken* atau urusan mengenai Etnis Tionghoa. Kejatuhan Dinasti Ming ternyata membawa dampak cukup signifikan terhadap kebijakan luar negeri bagi warga etnis Tionghoa. Di Hindia Belanda mulai berdatangan etnis Tionghoa *totok*, atau asli. Berbeda dengan etnis Tionghoa yang selama ini mendiami Hindia Belanda¹⁷, etnis Tionghoa yang datang menjelang keruntuhan Dinasti Ming memiliki ikatan kuat dengan tanah airnya. Hal ini terkait dengan kebijakan Dinasti Ming menjelang keruntuhannya, yang tetap menganggap diaspora etnis Tionghoa sebagai warga negaranya. Sementara kebijakan Dinasti Ming sebelumnya menganggap bahwa diaspora etnis Tionghoa tidak lagi menjadi warga negara Cina (Dinasti Ming). Selain itu, kejatuhan Dinasti Ming melalui Revolusi Cina membawa semangat perubahan. Semangat ini sekiranya mulai merasuk pula pada diaspora Etnis Tionghoa di Hindia Belanda. Muncul banyak penerbitan progresif berasal dari masyarakat ini, sehingga pengawasan terhadap etnis ini tidak hanya berdasarkan utusan Kapiten Cina, seperti masa sebelumnya.

Hindia Belanda di dekade ke dua abad ke dua puluh sudah menjadi negeri koloni yang tertata dan teratur secara administrasi. Secara kemakmuran dan

¹⁷ Etnis Tionghoa yang telah lama mendiami wilayah Hindia Belanda merupakan etnis Tionghoa keturunan, yang telah berinteraksi dengan warga bumiputra, dan biasanya sudah tidak memiliki ikatan dengan tanah leluhur walaupun masih melaksanakan tradisinya.

kesejahteraan pun sudah lebih baik dari masa sebelumnya. Hasil dari eksploitasi tambang di Hindia Belanda menambah pemasukan selain juga hasil perkebunan yang telah lama menjadi andalan ekspor Pemerintah Hindia Belanda. Meski begitu, terbukanya akses pendidikan untuk semua golongan memunculkan kesadaran mengenai rasial dan nasionalisme di kalangan masyarakat, tidak hanya bumiputera saja.

Mulai muncul tuntutan-tuntutan kesejahteraan dan kesetaraan dari masyarakat Hindia Belanda pada umumnya, termasuk juga dari kalangan Eropa. Bahkan terdapat tuntutan untuk kemerdekaan negara koloni untuk lepas dari negara induk.¹⁸ Hal ini tidak disukai oleh Pemerintah Hindia Belanda. Apalagi dengan masuknya paham kiri, yakni sosialis dan komunis dari negara induk, semakin memperkeruh suasana politik masa tersebut. Untuk mengatasi hal ini, Pemerintah Hindia Belanda membentuk Polisi PID¹⁹ yang tidak hanya bertugas mengawasi, juga menindaklanjuti aktivitas yang dirasa membahayakan pemerintah. Meski begitu golongan-golongan terpelajar tetap menemukan momen mereka di peristiwa Sumpah Pemuda pada tahun 1928, walau dengan pengawasan ketat dari pemerintah.

Memasuki tahun 1930an, keadaan justru berbalik dari sebelumnya. Dunia mengalami resesi yang berimbas pada ekonomi Hindia Belanda. Zaman ini disebut sebagai zaman *malaise*. Hindia Belanda sebagai penghasil komoditi perkebunan mengalami kemunduran secara ekonomi karena negara-negara lain membuat kebijakan proteksi untuk melindungi perekonomian negara masing-masing. Harga komoditi pertanian jatuh. Nilainya lebih rendah dari masa sebelumnya. Gula dan kopi yang menjadi komoditi andalan Hindia Belanda mengalami penurunan harga yang sangat signifikan. Akibatnya perusahaan-perusahaan, baik milik pemerintah maupun swasta mengalami kerugian. Banyak di antaranya mengalami kebangkrutan. Masyarakat, terutama di wilayah Jawa

¹⁸ Vlekke hlm: 338

¹⁹ Mengenai ini dapat dibaca selengkapnya di pendahuluan Inventaris Departement van BB Serie Politie.

dan Sumatra, di mana perusahaan perkebunan banyak berdiri mengalami kondisi memprihatinkan. Penurunan gaji maupun pemutusan hubungan kerja bagi buruh-buruh memperparah situasi politik Hindia Belanda. Tokoh-tokoh politik pergerakan semakin menggaungkan ide nasionalisme dan pemisahan negara koloni dan negeri induk, yang jelas saja ditentang oleh Pemerintah. Penangkapan dan pengasingan tokoh politik yang dianggap radikal semakin masif. Di dalam pemerintahan Hindia Belanda sendiri, peran wakil bumiputera di dalam *Volksraad* semakin besar. Terdapat tuntutan pula dari *Volksraad* agar Pemerintahan Hindia Belanda melepaskan diri dari negara induk.

Di satu sisi, terhambatnya barang-barang dari Eropa tergantikan oleh masuknya barang-barang dari Jepang. Jepang semakin menguasai ekonomi Hindia Belanda, meski keberadaan komunitasnya tidak terlalu tampak. Manuver ekonomi Jepang semakin masif tidak hanya di Hindia Belanda, tetapi juga di wilayah Asia lainnya. Bahkan ekspansi politik mereka sampai Manchuria di tahun 1931. Penaklukan Manchuria menjadi titik awal invasi Jepang ke wilayah lain di Asia. Pengawasan terhadap urusan Jepang dan Cina tidak lagi dipisah dan digabungkan dalam ke dalam *Afdeeling CZ* tahun 1933.

Setelah penaklukan Manchuria di tahun 1931, Jepang melebarkan kekuasaannya di Asia melalui pendudukan wilayah Cina di tahun 1937. Menuju akhir dekade 1930 Jepang telah tampil menjadi negara yang diwaspadai Eropa karena kiprahnya mengancam keberadaan koloni Eropa di Asia. Jepang yang telah mengalami kemajuan industri di berbagai sektor, termasuk industri pesawat terbang menjadi perhatian khusus Pemerintah Hindia Belanda. Hal ini melatari dibentuknya *Afdeeling LBD (Luchtbeschermingsdienst)*, yang merupakan urusan yang mengurus tentang pengamanan udara di tahun 1938. Selain itu, dekade 1930an juga merupakan tahun-tahun didirikannya lapangan terbang sebagai basis militer di beberapa wilayah Hindia Belanda.

Perang Dunia kedua yang meletus tahun 1939 menjadi tahun krusial juga bagi Hindia Belanda sebagai koloni. Jepang membentuk aliansi dengan Jerman dan Italia, serta lima negara Eropa yang lain. Pembentukan aliansi dengan Jerman, serta invasi Jepang ke Cina dianggap ancaman bagi keberadaan

koloni Eropa. Ancaman ini diperparah dengan kejatuhan Pemerintah Belanda sebagai negara induk oleh Jerman di daratan Eropa pada tahun 1940. Pemerintah Belanda pun mengungsi ke Inggris. Sementara itu, respon Pemerintah Hindia Belanda sebagai negara koloni adalah menyiapkan mobilisasi untuk menghadapi kemungkinan terburuk ancaman Jepang yang merupakan aliansi Jerman. Tahun 1941 dibentuklah *Afdeeling SM (Staatsmobilisatieraad)* yang merupakan persiapan dalam penyelamatan pemerintah Hindia Belanda ke Australia.

Perang Dunia kedua di Wilayah Asia Pasifik dimulai dengan peristiwa Pearl Harbour, yakni pengeboman basis militer Amerika di Hawaii, wilayah Kepulauan Pasifik pada Desember 1941. Untuk mengantisipasi kemungkinan invasi Jepang ke wilayah koloni milik sekutu, 15 Januari 1942 dibentuk ABDACOM atau *America, British, Dutch, and Australia Command*. ABDACOM dibentuk untuk melindungi negara koloni negara-negara sekutu tersebut di Asia. Sayangnya, baru berdiri selama beberapa minggu, aliansi ini bubar dengan sendirinya setelah Jepang berhasil mendapatkan sumber minyak milik Hindia Belanda di Palembang, Kalimantan, Sulawesi, dan wilayah koloni lain seperti Malaya, serta Brunei. Singapura, sebagai basis pertahanan koloni Pemerintah Inggris di Asia jatuh pada tanggal 15 Februari 1942, disusul Hindia Belanda (Batavia) tidak lama kemudian.²⁰

Kejatuhan Pemerintah Hindia Belanda ditandai dengan kalahnya pihak Sekutu melawan militer Jepang dalam pertempuran Laut Jawa tanggal 27 Februari 1942. Segera setelah kalahnya pihak Sekutu, Gubernur Jenderal Tjarda van Starkenborgh pindah ke Bandung yang diikuti para pejabat tinggi pemerintah Hindia Belanda. Bandung sebagai pusat militer diharapkan mampu menahan gempuran Jepang. Akan tetapi ternyata invasi militer Jepang tidak terbendung. Batavia sebagai ibu kota Hindia Belanda jatuh ke tangan Jepang pada 5 Maret 1942, disusul kota-kota lain. Pemerintah Hindia Belanda yang

²⁰<https://www.britannica.com/event/World-War-II/Pearl-Harbor-and-the-Japanese-expansion-to-July-1942> akses tanggal 4 Oktober 2023 jam 15.05
https://esi.kemdikbud.go.id/wiki/Perang_Asia_Timur_Raya akses tanggal 4 Oktober 2023 jam 13.05

terdesak kemudian membuat kesepakatan tunduk pada Pemerintah Jepang melalui Perundingan Kalijati, 7 Maret 1942. Perundingan ini menandai berakhirnya kekuasaan Belanda atas tanah koloninya. Pemerintah Hindia-Belanda berbondong-bondong melarikan diri ke Australia melalui Pelabuhan Cilacap. Sementara masyarakat Eropa yang tidak dapat melarikan diri ditangkap dan dimasukkan dalam kamp-kamp.

Pendudukan Jepang berlangsung sedari tahun 1942-1945, ketika Jepang dinyatakan kalah dalam Perang Dunia kedua. Pada masa pendudukan Jepang ini sistem administrasi maupun penataan arsip di Departement van BB tidak berubah secara fungsi, melainkan berubah nama disesuaikan dengan Bahasa Jepang. Bahasa Belanda dan Bahasa Inggris dilarang, sehingga bahasa administrasi yang digunakan selama masa pendudukan ini adalah Bahasa Jepang dan Bahasa Indonesia. Pelarangan Bahasa Belanda tersebut menyebabkan penggunaan Bahasa Indonesia semakin kokoh sebagai bahasa nasional.

Untuk memenangkan hati rakyat, Pemerintah pendudukan Jepang juga menempatkan pejabat-pejabat dari bumiputera dalam administrasinya. Masa ini pihak Jepang menggandeng tokoh-tokoh nasionalis dan menjanjikan kemerdekaan bagi Hindia Belanda, dengan nama sesuai cita-cita, Indonesia. Nama Batavia pun diubah menjadi Jakarta, sesuai dengan nama wilayah itu sebelum menjadi wilayah koloni VOC dan Belanda.

Keberadaan Jepang selama tiga setengah tahun dengan segala dinamika pendudukannya yang menambah kesengsaraan rakyat, menjadi titik kebangkitan para tokoh maupun priyayi bumiputera. Pegawai-pegawai bumiputera menggantikan para pegawai Eropa yang ditangkap maupun melarikan diri. Pegawai-pegawai bumiputera inilah yang nantinya mengisi jabatan-jabatan tinggi ketika Indonesia menyatakan kemerdekaan dan mempertahankan kemerdekaannya.

Selain menempatkan diri sebagai “saudara tua”, Jepang juga menggandeng para tokoh politik untuk mendapat simpati rakyat. Simpati ini dibutuhkan agar rakyat dapat digunakan sebagai sumber daya perang melawan sekutu. Selain itu janji kemerdekaan (semu) diwujudkan dengan pembentukan

Cuo Sangi In (Dewan Penasihat Pusat) yang diketuai Sukarno, serta berbagai organisasi bentukan Jepang, termasuk militer, demi kepentingan perang, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Hal ini menimbulkan ketidaksenangan beberapa kalangan. Tahun 1944 perlawanan-perlawanan mulai muncul di berbagai wilayah pedesaan di tanah air. Para pemuda intelektual membuat jaringan mereka sendiri. Di sisi lain, Jepang mulai mengalami kekalahan di berbagai tempat. Hal ini dimanfaatkan kalangan militer bentukan Jepang, PETA (Pembela Tanah Air), untuk melakukan perlawanan di Blitar pada Februari 1945. Jepang mulai melihat bibit-bibit revolusi mulai terbentuk di kalangan masyarakat. Untuk tetap memegang kendali, Jepang mulai melepaskan kekangan-kekangan mereka terhadap politik Indonesia. Bulan Maret 1945 dibentuklah BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) yang beranggotakan tokoh-tokoh politik senior dari berbagai kalangan. Jepang berharap bila nantinya Indonesia merdeka berada di kalangan politisi senior yang dirasa lebih mudah diatasi daripada golongan pemuda.²¹

Sedari terbentuknya di bulan Maret sampai bulan Juni 1945, BPUPKI melaksanakan persiapan-persiapan kemerdekaan melalui pertemuan-pertemuan untuk membentuk dasar negara hingga merancang konstitusi pertama Indonesia. Bulan Juli, semua unsur pihak Jepang sepakat memberikan kemerdekaan pada Indonesia untuk beberapa bulan ke depan. Selama kurun waktu tersebut pihak Jepang mengalami banyak kekalahan. Banyak wilayah telah jatuh ke tangan Sekutu, Indonesia tinggal menunggu waktu jatuh juga ke tangan Sekutu. Demi menghambat jatuhnya Indonesia ke tangan Belanda lagi, Jepang berencana memberikan kemerdekaan di bulan September.

Pada 6 Agustus 1945 bom atom dijatuhkan di Hiroshima, sehari kemudian tanggal 7 Agustus PPKI dibentuk dengan Sukarno sebagai ketuanya, serta Hatta sebagai wakilnya. Kemudian tanggal 9 Agustus dijatuhkan di Nagasaki, menandai kekalahan telak Jepang atas Sekutu. Hari berikutnya

²¹ Ricklefs: 423

Sukarno, Hatta, dan Radjiman bertolak ke Saigon untuk menemui Panglima Terauchi menuntut kemerdekaan. Jepang menjanjikan kemerdekaan segera untuk seluruh wilayah bekas jajahan Belanda. Tanggal 14 Agustus mereka kembali ke tanah air. Kemudian tanggal 16 Agustus terjadi penculikan oleh para tokoh pemuda. Sukarno dan Hatta dibawa ke Rengasdengklok, dan didesak untuk mendeklarasikan kemerdekaan secepatnya. Tanggal 17 Agustus 1945 akhirnya dideklarasikanlah kemerdekaan Indonesia. Tanggal 18 Agustus pembentukan konstitusi dan pembentukan badan lain berjalan di waktu-waktu kemudian.

Kemerdekaan Indonesia untuk masa selanjutnya tidaklah berproses secara mulus. Indonesia harus mengalami masa revolusi selama lima tahun sampai pejajahan benar-benar hilang dari bumi pertiwi. Karena tidak lama setelah pendeklarasian kemerdekaan dan proses pembentukan institusi negara, Belanda sekonyong-konyong datang kembali ke tanah air membonceng pasukan Sekutu. Sekutu yang datang ke Indonesia untuk mengambil alih pemerintahan dari Jepang dikejutkan dengan adanya pemerintah baru yang tidak mereka bayangkan. Sementara itu Pemerintah Kolonial Belanda yang berada dalam pengasingan di wilayah Australia selama masa pendudukan Jepang telah bersiap menempatkan pemerintahannya kembali, melalui NICA di bumi Nusantara.

Pada tahun 1944 untuk mempersiapkan pengambilalihan koloni, Pemerintah Kolonial membuat kesepakatan dengan Amerika untuk mengatur pemerintahan sipil dan sistem peradilan di wilayah Hindia Belanda. Prinsip-prinsip yang akan mengatur hal ini ditetapkan dalam *Civil Affairs Agreements*. Lantas dari sinilah *Netherlands Indies Civil Administration* (NICA) muncul sebagai organisasi. NICA ditempatkan di bawah kendali penguasa kolonial untuk melaksanakan pemerintahan di wilayah yang telah dibebaskan selama periode di mana tanggung jawab penuh atas pemerintahan belum diserahkan kepada pemerintah Hindia Belanda.

Departement van Binnenlandsch Bestuur yang termiliterisasi berada di bawah komando penguasa kolonial Sekutu, juga memiliki wewenang untuk

bertindak atas nama pemerintahan Belanda sendiri. Dalam hal ini, sistem peradilan dilaksanakan atas nama Ratu, dan di bawah gelar ini juga pengeluaran ordonansi dan keputusan pemerintah dilakukan.

Ketika pada tanggal 15 Agustus 1945, Wilayah Pasifik Selatan yang berada di bawah komando Amerika, yang terutama mencakup Jawa, Kalimantan, dan Kepulauan Maluku Besar, diserahkan kepada Komando Asia Tenggara Britania (SEAC), maka ketentuan-ketentuan dari Perjanjian Urusan Sipil yang telah disepakati dengan Amerika hampir tidak mengalami perubahan saat diadopsi.

Bulan September-Oktober 1945 pasukan Sekutu mulai masuk ke wilayah timur, begitu pula dengan pemerintah Belanda yang mulai bergerak menegakan administrasinya kembali.²² Di Jakarta sendiri, pemerintah Republik Indonesia sedang tertatih membentuk institusi pemerintahnya karena tidak mewarisi otoritas administratif dari Pemerintah Pendudukan Jepang.²³ Otoritas Pemerintah Republik Indonesia yang belum sampai ke daerah selain Jawa dan Sumatra memudahkan masuknya kembali pasukan Sekutu serta Belanda untuk menegakan kembali pemerintahannya. Kedatangan pasukan Sekutu dan Belanda meningkatkan ketegangan di seluruh wilayah sampai pecah pertempuran revolusi sepanjang akhir tahun 1945 (dan selanjutnya).

Pada Januari 1946, Belanda berhasil menduduki Jakarta lebih jauh sehingga diputuskan memindahkan Ibu Kota Republik ke Yogyakarta. Sejak saat itu Jakarta kembali dinamakan Batavia oleh Pemerintah Kolonial Belanda. Sementara Pemerintah Kolonial Belanda melalui NICA mulai menata kembali administrasi pemerintah kolonial di Batavia. Kepala biro NICA/AMACAB di *Departemen van Binnenlandsche Bestuur* bertanggung jawab atas koordinasi kegiatan berbagai departemen pemerintahan umum, sejauh kegiatan tersebut juga berada dalam lingkup NICA/AMACAB itu sendiri. Oleh karenanya dalam *Departemen van Binnenlandsch Bestuur* muncul urusan yang mewakili fungsi

²² Ricklefs: 435.

²³ Robert Bridson Cribb, *Gejolak Revolusi Di Jakarta 1945-1949: Pergulatan Antara Ekonomi dan Hegemoni*. Jakarta: PT.Pustaka Utama Grafiti. Hlm: 18.

departemen urusan umum ini, diantaranya yakni *Afdeeling* EZ untuk *Economische Zaken*, *Afdeeling* VW untuk *Verkeer en Waterstaat*, *Afdeeling* Just untuk *Justitie*, dan *Afdeeling* Fin untuk *Financien en Oorlog*. Selain itu, pejabat NICA ini terhubung dengan Pasukan Sekutu Belanda Hindia Timur (AFNEI) dari Komando Asia Tenggara (SEAC), yang didirikan di Batavia pada akhir September 1945.

Dari sinilah peran *Departement van Binnenlandsch Bestuur* pada masa revolusi begitu sentral. Terjadi berbagai penyesuaian urusan *afdeeling* dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Bahkan muncul beberapa *afdeeling* baru yang merupakan kepanjangan dari departemen pemerintahan yang ada. Pada *Departement van Binnenlandsch Bestuur*, Organisasi NICA ini masuk dalam urusan *Afdeeling* CA. Untuk mendukung kinerja NICA, selama pengasingannya di Australia Pemerintah Kolonial membentuk Komisi Hindia Belanda untuk Australia dan Selandia Baru. Sebelum dibubarkan pada tahun 1944, komisi ini melalui *Staatsblad* D 65 tahun 1944 telah berhasil membentuk departemen-departemen pemerintah umum yang nantinya didirikan kembali ketika Jepang kalah dan pemerintah kolonial kembali menguasai koloninya.²⁴ Departemen ini adalah Kehakiman (*Departemen van Justitie*), Pemerintahan Dalam Negeri (*Departement van Binnenlandsch Bestuur*), Ekonomi (*Economische Zaken*), Transportasi dan Pengairan (*Departement van Verkeer en Waterstaat*), Pendidikan dan Urusan Keagamaan (*Departement van Onderwijs en Eredienst*), Keuangan dan Perang (*Departement van Financiën en Oorlog*). Sehingga ketika Jepang dinyatakan kalah, dan terdapat serah terima kekuasaan pemerintah kolonial sudah menyiapkan administrasi pemerintah yang disesuaikan dengan keadaan pasca perang.

Untuk pengaturan secara organisasi berdasar *Indische Staatsblad* 1946 nomor 5 dijelaskan bahwa untuk jabatan CCO-NICA (*Chief Commanding Officer*) memiliki fungsi setara gubernur, untuk jabatan SO-NICA (*Staff Officer*) hingga 28 September 1945 memiliki fungsi setara residen, dan untuk

²⁴ Pendahuluan Algemeene Secretarie Templaar 1946-1950.

jabatan CO-NICA (*Commanding Officer*) hingga tanggal yang sama memiliki fungsi setara asisten residen. Kemudian mulai tanggal 28 September 1945, CO-NICA dianggap setara dengan residen, sementara Sub-CONICA dianggap sebagai asisten residen. Tentang tugas pemerintahan ini, beberapa informasi dapat ditemukan, untuk sementara hanya berlaku untuk Borneo dan Kepulauan Maluku Besar, dalam peraturan di *Indische Staatsblad* 1946 nomor 17 dan 18, Pemberian pangkat dalam NICA/AMACAB hampir sama, meskipun struktur organisasi layanan dalam periode eksistensinya yakni hingga akhir November 1946, agak kurang terorganisir.

Organisasi ini diubah namanya oleh pihak Inggris menjadi Cabang Urusan Sipil Administrasi Militer Sekutu (AMACAB). Akan tetapi, sebutan AMACAB sebenarnya hanya digunakan di Jawa dan Sumatra.²⁵ Di Kalimantan dan Kepulauan Maluku Besar, di mana bantuan pasukan Australia diperlukan untuk melakukan pendudukan kembali, serta tempat di mana pasukan Belanda diizinkan untuk bertindak, nama NICA tetap digunakan hingga pasukan Sekutu mundur pada Juli 1946.

Setelah bulan Juli 1946, penyerahan pemerintahan dari Borneo dan Kepulauan Maluku Besar ke pemerintah Hindia Belanda terjadi, bentuk pemerintahan sebelum perang dengan residen-residen dan sebagainya kembali diterapkan dalam rangka menunggu penetapan peraturan pemerintahan yang definitif. Sementara itu, wilayah-wilayah ini sementara ditempatkan di bawah Komisariat Pemerintah yang didirikan khusus untuk Borneo dan Kepulauan Maluku Besar, di mana Direktur Urusan Dalam Negeri atau *Binnenlandsch Bestuur* dr. W. Hoven, memimpin. Konferensi Malino dan Denpasar memberikan arah menuju hubungan kebijakan negara yang akan datang. Konferensi Malino sendiri dilaksanakan pada tanggal 16 Juli 1946 di Kota Malino Sulawesi Selatan. Pertemuan Malino ini adalah pertemuan dari perwakilan seluruh wilayah di Hindia Belanda yang merupakan simbol bahwa

²⁵ Perubahan nama ini diperlukan karena citra negatif yang telah dikaitkan dengan organisasi NICA di kalangan masyarakat Indonesia, serta karena kata "Nica" dalam mitologi Jawa merujuk pada "anjing neraka"

pemerintah Hindia Belanda kembali mengambil tanggung jawab atas jalannya negara. Konferensi ini menyatakan dukungannya terhadap prinsip Republik Indonesia Serikat yang bekerja sama dengan Belanda. Melalui Konferensi ini dicetuskanlah ide UNI Belanda-Indonesia, yakni wilayah-wilayah yang tunduk pada Belanda membentuk negara bagian yang nantinya bersatu melalui federasi.

Pada akhir November 1946, Jawa dan Sumatra juga diserahkan oleh pemerintahan AFNEI (*Allied Forces Netherlands-East Indies*) kepada pemerintah Hindia Belanda di bawah Van Mook dan organisasi AMACAB dihentikan. Setelah ini, *Tijdelijke Bestuursdienst* (TB) didirikan. Pemerintahan sipil Belanda hanya meluas ke beberapa enklave kecil di kedua pulau tersebut, sehingga dengan pembentukan pemerintahan sementara, harapannya adalah untuk mengatasi pengaruh republik yang ada dalam proses menunggu penurunan pengaruh pemerintahan republik. Para residen kepala dari *Tijdelijk Bestuur* (Pemerintahan Sementara) diberi "otoritas militer", sehingga semua tindakan darurat yang berdampak pada penduduk sipil dapat diambil oleh pejabat pemerintah yang dianggap lebih mampu memahami konsekuensi sipil daripada pejabat militer. Di bawah kepala TB, terdapat kepala pemerintahan lokal, yang fungsinya mirip dengan jabatan asisten residen.

Walau menyisakan wilayah yang kecil, Pemerintah Republik Indonesia tidak tinggal diam. Perjuangan mempertahankan dan mendapat pengakuan kemerdekaan diusahakan melalui perundingan diplomasi mereka yang pertama, yakni Perundingan Linggarjati. Dalam Perundingan Linggardjati yang ditandatangani dengan Republik Indonesia pada tahun 1946, disepakati bahwa Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia secara *de facto*, pengakuan wilayah Republik Indonesia yakni Jawa, Sumatera, dan Madura, kemudian kesepakatan kedua pemerintah bekerjasama membentuk Uni Belanda-Indonesia. Namun terdapat perbedaan pendapat mengenai struktur Uni dengan Republik, salah satunya adalah Republik menjadi bagian dari wilayah Uni Belanda-Indonesia. Bersamaan dengan wilayah-wilayah lainnya, pembangunan federasi juga dilakukan. Negara bagian memiliki pemerintahan sendiri dengan penerapan

desentralisasi melalui pembentukan daerah otonom (daerah). Hal ini merupakan upaya yang dilakukan untuk memperhitungkan keinginan kelompok masyarakat yang memiliki keterkaitan ekonomi, etnis, atau budaya. Namun, pertimbangan politik juga tetap dijaga. Pengaturan kembali dilakukan berdasarkan pembagian provinsi dan pemerintahan sebelum perang, undang-undang otonomi daerah 1938, dan kebijakan desentralisasi yang pernah diterapkan. Prinsip ini dijelaskan dalam berbagai konferensi (Pangkal Pinang, Denpasar) dan dalam perjanjian yang ditandatangani dengan Republik Indonesia (Linggardjati, Renville). Namun semuanya tetap bersifat sementara menunggu pengaturan yang lebih definitif.

Agresi Militer pertama pada bulan Juli 1947, merupakan pelanggaran pertama terhadap Perundingan Linggarjati. Pemerintah Belanda menduduki wilayah Sumatra dan Madura yang pada awal kesepakatan merupakan wilayah Republik Indonesia. Hasil dari aksi ini bagi pihak pemerintah Belanda adalah sebagian besar wilayah yang luas kembali berada di bawah kekuasaan mereka. Pada tanggal 19 Juli 1947, suatu organisasi pemerintahan sementara didirikan berdasarkan *Indische Staatsblad* 121 untuk mengembalikan keamanan dan melakukan rekonstruksi di wilayah-wilayah yang baru saja diduduki kembali. Proses reorganisasi pemerintahan diberikan kepada lima Komisaris Pemerintahan untuk Urusan Pemerintahan (*Regeringscommissaris voor Bestuursaanlegenheden* disingkat RECOMBA) di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, serta Sumatra Utara dan Sumatra Selatan. Di Padang, Kepala TB tetap ada karena wilayahnya yang tidak berkembang begitu luas. Posisi *Algemeen Hoofd* TB Jawa dan *Hoofd* TB Sumatra dihapuskan. RECOMBA diberikan wewenang gubernur dan sama seperti Kepala TB yang berada di bawah mereka, mereka diberi "otoritas militer". Mereka bertanggung jawab atas wilayah bekas provinsi sebelum perang yang dikuasai oleh pasukan Belanda. Mereka dibantu oleh sejumlah pegawai pemerintah Belanda dan Indonesia yang ditugaskan, serta perwakilan teknis dari Departemen Kehakiman, Ekonomi, Perhubungan dan Air, Sosial, Pendidikan, serta Dinas Kesehatan.

Mereka diinstruksikan untuk bekerja secara erat dengan para Komandan

Pasukan yang bertanggung jawab atas tindakan penertiban, dan di mana tentara berinteraksi dengan penduduk, tentara tersebut sebaik mungkin harus mengikuti pedoman politik dari RECOMBA. Sistem pemerintahan dwitunggal yang ada sebelum perang, yang memisahkan sepenuhnya fungsi-fungsi antara pegawai dalam korps pemerintahan Eropa dan Indonesia dirombak. Di mana situasinya memungkinkan, posisi-posisi pemerintahan segera diisi, dan dalam pengisian posisi tersebut juga melibatkan pegawai yang mendukung republik. Tenaga ahli Indonesia ditempatkan dalam berbagai tingkatan pemerintahan, termasuk dalam fungsi RECOMBA atau perwakilan lokal dari RECOMBA. Fungsi RECOMBA kemudian dihapuskan untuk daerah-daerah yang memperoleh status negara dan oleh karena itu tugas-tugas administratifnya dialihkan.²⁶ Wilayah yang mendapat status negara yakni Negara Sumatra Timur, Negara Jawa Barat yang diberi nama Pasundan, Negara Sumatera Selatan, Negara Jawa Timur, dan seterusnya sampai terdapat 15 negara bagian federal berdasar wilayah yang telah direbut.²⁷

Dunia mengecam keras aksi Agresi Militer Pertama ini. Reaksi atas aksi ini, pada awal Januari 1948 Pemerintah Hindia Belanda didesak melaksanakan perundingan kedua dengan Pemerintah Republik Indonesia. Perundingan kedua ini yakni diadakan di atas kapal Amerika Serikat U.S.S. Renville dengan Amerika sebagai penengah dan kedua negara diwakili oleh negara lain, yaitu Belanda diwakili oleh Belgia, lantas Indonesia diwakili oleh Australia. Perundingan Renville ini menghasilkan kesepakatan antara lain salah satunya bahwa kekuasaan Republik hanya tinggal wilayah Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera saja. Sehingga wilayah Pemerintah Hindia Belanda pun semakin luas.

Negara-negara dan daerah otonom ini secara alami menuntut pengaruh lebih besar terhadap kebijakan pemerintah pusat Hindia Belanda. Sebagai langkah pertama menuju hal ini, pada tanggal 9 Maret 1948 sebuah Pemerintah

²⁶ Pendahuluan AlSec Templaar

²⁷ Ricklefs hlm.: 455

Federal Sementara/*Voorlopige Federale Regering* (VFR) dibentuk untuk bertindak sebagai pemerintah interim hingga Indonesia Serikat/*Verenigde Staten van Indonesie* (VSI) terbentuk oleh semua negara bagian termasuk Republik. Pemerintah interim ini terdiri dari Letnan Gubernur Jenderal, sebelas menteri negara-kepala Departemen Pemerintahan Umum/*Algemeen Bestuur*, dua menteri negara dengan tugas khusus (Keamanan Dalam Negeri dan Urusan Pemerintahan Daerah), Komandan Angkatan Darat dan Komandan Angkatan Laut. Sekretariat Negara ketiga dari Luar Negeri, diwakili oleh menteri Pendidikan, Seni, dan Ilmu Pengetahuan/*Opvoeding, Kunsten en Wetenschappen*.

Selama menunggu kesepakatan politik dengan Republik, yang memungkinkan keterlibatan pihak Republik dalam pemerintah interim, awalnya delapan posisi dalam pemerintah ini diisi oleh pejabat-pejabat Belanda. Tujuh posisi diisi oleh orang Indonesia yang telah memainkan peran penting dalam pembentukan negara federal. Di satu sisi, VFR menggantikan peran Dewan Kepala Departemen dan menjadi pembentuk peraturan resmi (ordonansi). Secara formal selama menunggu revisi konstitusi, VFR tidak memiliki kewenangan yang lebih besar daripada Dewan Kepala Departemen (yang masih menggunakan nama resmi mereka), namun hanya berkolaborasi dalam praktik pemerintahan.

Rancangan untuk pengaturan definitif segera dibahas dalam VFR dan dikirimkan ke Den Haag. Pembentukan lembaga perwakilan rakyat pusat yang melibatkan seluruh kelompok penduduk dalam federasi ini pada akhirnya akan menjadi tahap terakhir dalam pembangunan negara yang demokratis.

Kemudian, pada bulan Mei 1948 Konferensi Federal diadakan di Bandung dengan tujuan merancang struktur negara masa depan yaitu Republik Indonesia Serikat. Tak lama setelahnya itu di tempat yang sama, Pertemuan Konsultasi Federal/*Bijeenkomst voor Federale Overleg* (BFO) diadakan yang dihadiri kepala negara dan pemimpin pemerintahan wilayah federal. Tujuan mereka adalah memberikan kontribusi untuk menemukan bentuk pemerintahan selama periode transisi sebelum Republik Indonesia Serikat menjadi negara

berdaulat. Pertemuan ini menghasilkan Resolusi Bandung. Berdasarkan Resolusi Bandung dan rancangan VFR pada bulan Agustus dan September 1948, BFO melakukan pembicaraan dengan pemerintah Belanda di Den Haag. "Pertemuan Den Haag" ini kemudian menghasilkan Keputusan Penyelenggaraan Pemerintahan di Indonesia dalam Masa Transisi/*Besluit Bewindvoering in Indonesië in Overgangstijd* (Keputusan BIO). Kemungkinan untuk memperkenalkan tata hukum baru ini telah disiapkan pada bulan September dengan penambahan bab baru ke dalam konstitusi Belanda.

Sementara itu, pada bulan Oktober 1948, Laksamana Gubernur Jenderal Van Mook mengajukan pengunduran dirinya. Dia digantikan oleh Dr. L.J.M. Beel dengan gelar Wakil Tinggi Mahkota/*Hoge Vertegenwoordiger van de Kroon* (HVK). Gelar ini merupakan langkah awal menuju perkembangan menuju Uni Belanda-Indonesia.

BFO dibentuk untuk membentuk Negara Indonesia Serikat meski tanpa Republik Indonesia. Akan tetapi meski telah dibentuk lembaga tersebut, di dalam BFO sendiri ada rasa pro-republik dan ada ketidaksenangan rakyat dengan bentuk negara federal. Selain itu pelaksanaan Keputusan BFO tidak pernah terwujud, karena tidak ada kesepakatan yang ditemukan dengan republik mengenai penyelarasan mereka dalam tatanan federal. Hal ini menimbulkan ketidakpuasan pada Pemerintah Hindia Belanda dan mempertimbangkan untuk melaksanakan langkah terakhir, yakni langkah militer. Apalagi dengan adanya gesekan-gesekan politis dan militer dengan Republik Indonesia yang masih terjadi bahkan di belakang garis van Mook dan ketika terjadi penarikan pasukan Divisi Siliwangi oleh Nasution dari Jawa Barat ke Jawa Tengah. Ketidakpuasan dari Pemerintah Hindia Belanda akhirnya mengambil keputusan untuk melancarkan Agresi Militer kedua pada 18 Desember 1948, yakni melumpuhkan Yogyakarta sebagai ibukota Republik Indonesia sekaligus mengambil alih seluruh wilayah Republik Indonesia.

Sementara itu, di sisi pemerintah Hindia Belanda, setelah tindakan Agresi Militer kedua di Jawa dan Sumatra, konstruksi yang sama diterapkan untuk reorganisasi pemerintahan. Dengan Undang-Undang Pemerintah 1948

no. 317 dan 318, posisi Penasehat Pemerintahan Wilayah (*Territoriaal Bestuurs Adviseur/TBA*) diperkenalkan untuk wilayah-wilayah yang baru saja diduduki. Berdasarkan Keadaan Perang dan Darurat, TBA diberikan wewenang yang sama seperti yang diberikan kepada RECOMBA pada tahun 1947. Posisi ini dibentuk untuk Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, serta Sumatra Utara, Tengah, dan Selatan. Di bawah TBA, juga ada Penasehat TBA yang Didelegasikan (*Gedelegeerd TBA/GTBA*), yang bertugas mengatur secara lokal (seperti di Yogyakarta).

Di Borneo dan Kepulauan Maluku Besar, Nugini Baru, Riouw, Bangka, dan Billiton, pelayanan pemerintahan sebelum perang hampir sepenuhnya diperkenalkan kembali dalam skala penuh setelah bulan Juli 1946. Ada pembagian antara residen, asisten residen, dan kontrolir. Di Negara Indonesia Timur, setelah kekuasaan daerah ditransfer ke negara bagian ini, pelayanan pemerintahan ditempatkan di bawah otoritas *Departement van Binnenlandsch Bestuur* atau Kementerian Dalam Negeri. Dalam *organisasi Departement van Binnenlandsch Bestuur*, urusan ini menjadi fungsi dari *Afdeeling ARC* atau *Algemeene Regering Commisariaat voor Borneo en de Groote Oost*. Sebelumnya, kekuasaan berada di tangan perwakilan Belanda di Makassar, yaitu Komisariss Mahkota atau *de Commissaris van de Kroon*. Pelayanan pemerintahan di wilayah lainnya berada di bawah *Departemen van Binnenlansch Bestuur* di Batavia.

Agresi Militer kedua mejadi titik balik perjuangan revolusi bagi pihak Republik. Aksi ini mendapat kecaman keras dari PBB, terutama Amerika. Alasan utamanya karena ketika aksi ini terjadi, Komisi Jasa Baik yang terdiri dari perwakilan Amerika, Australia, dan Belgia yang sedianya menjembatani perdamaian antara Pemerintah Hindia Belanda dan Republik Indonesia sedang berada di Kaliurang, Yogyakarta. Oleh sebab itu Belanda dianggap tidak memiliki itikad baik dalam perdamaian. Hasil dari kecaman ini adalah Amerika memutus bantuan ekonomi pasca Perang Dunia kedua untuk Belanda, selain itu Amerika mendesak Belanda untuk mengakui kemerdekaan Republik Indonesia tidak lagi secara *de facto*, melainkan juga secara *de jure*.

Setelah campur tangan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, pada bulan Maret 1949 di bawah pengawasan *United Nations Commission for Indonesia* (UNCI), perundingan antara Belanda dan republik diadakan di Batavia. Perundingan ini menghasilkan Persetujuan Van Roijen-Roem (7 Mei) dan diikuti oleh memorandum bersama mengenai waktu dan syarat-syarat Konferensi Meja Bundar (KMB) yang akan diadakan. HVK Beel yang tidak setuju dengan kebijakan ini, mengundurkan diri pada 9 Mei 1949 dan digantikan oleh Dr. A.H.J. Lovink.

Setelah pemerintahan republik kembali ke Yogyakarta dan pertempuran berakhir, Konferensi Meja Bundar dimulai pada tanggal 23 Agustus 1949. Pada awal Agustus, Konferensi Inter-Indonesia diadakan di Yogyakarta dan Jakarta antara pihak republik dan federalis untuk membahas struktur tata negara internal dan prosedur yang akan diikuti dalam KMB. KMB yang berakhir pada tanggal 2 November 1949, menghasilkan piagam pengalihan kedaulatan dan *uniestatuut*, yang mengatur Persatuan Belanda-Indonesia. Dalam beberapa perjanjian terkait, pengalihan berbagai kepentingan negara diatur. Penyerahan resmi kedaulatan berlangsung pada tanggal 27 Desember 1949. Meski begitu secara administrasi pemerintahan tidak serta merta langsung berubah. Terdapat penyelarasan dan penyesuaian selama masa integrasi ini. Oleh karenanya secara arsip masih ditemukan arsip *Departement van Binnenlandsch Bestuur* (serta arsip Departemen lain) sampai dengan tahun 1950.

1.3. Riwayat Arsip

1.3.1. Sistem Penataan

Pemerintah kolonial Hindia-Belanda mengikuti sistem kearsipan yang berlaku di negeri asalnya Belanda. Secara kronologis, *Departement van Binnenlandsh Bestuur* telah beberapa kali mengalami perubahan sistem penataan arsip, diantaranya adalah menggunakan sistem *verbaal* dan sistem *agenda*.

Secara historis sistem penataan arsip *verbaalstelsel* merupakan pengembangan dari *resoluiestelsel* yang berlaku di negeri Belanda

sejak abad 17. Awal diberlakukan sejak penerbitan *Koninklijk Besluit* No. 7, (4 September 1823) dan mulai di terapkan di Hindia Belanda pada tahun 1830. (Otten, 2008:46). Inti dari sistem ini berpusat pada *serie verbaal* yaitu penataan secara kronologis *minuut*/draf keputusan yang ditulis dalam kertas dobel folio, yang di dalamnya dimasukkan konsep surat keluar serta dokumen lain seperti laporan, catatan, saran. Arsip ditata sesuai urutan nomor verbaal, dilengkapi dengan jalan masuk berupa *indeks* dan *hoofdenlijst*.

Perubahan sistem terjadi setelah 1924, arsip-arsip kolonial ditata berdasarkan *agendastelsel*, (Daryan 1998:186; Parani, 1976; Puslitbang ANRI, 1988), yakni penataan arsip menurut subyek dengan jalan masuk *register* agenda. Dalam perkembangannya pencatatan surat masuk dan surat keluar dicatat pada kartu korespondensi sesuai dengan klasifikasi (*hoofdenlijst*) berlangsung hingga akhir kehadiran Belanda di Indonesia pada tahun 1949. Sistem pencatatan dan pengaturan arsip sistem agenda dikenal juga dengan sistem Kaulbach, ditandai dengan mempergunakan kartu korespondensi dimana pengelompokan arsipnya berdasarkan klasifikasi atau *hoofdenlijst*. Penerimaan surat masuk langsung dicatatkan pada kartu menurut *afdeeling* dan masalahnya (Puslitbang ANRI, 1988:3)

Dalam inventaris ini hanya mencakup arsip *Binnenlands-Bestuur Serie Toegangen* sehingga belum diuraikan hubungan antara arsip *toegangen* dengan arsipnya. Hubungan tersebut dapat dijelaskan setelah melalui penelitian kearsipan lebih mendalam terkait dengan hubungan khazanah ini dengan khazanah arsip lain (*Departementen van Algemene Bestuur*, 1849-1950) seperti *Algemene Secretarie*, *Departement van Onderwijs* dan *Departement van Financiën*.

1.3.2. Jenis dan Periode

Sistem penataan arsip pemerintah Kerajaan Belanda termasuk daerah koloninya pada abad 18-19 memiliki beberapa ciri khas (Schie,

1991). Sistem Verbaal yang diterapkan oleh *Departement van Binnenlands Bestuur* hingga tahun 1924 memiliki beberapa sarana pencatatan surat masuk dan keluar (*Inkomende Agenda, Uitgaande Agenda, In –en uitgaande Agenda*) yang dicatat secara kronologis, kemudian sistem klasifikasi subjek (*Hoofdenlijst*) pencatatan surat keluar berdasarkan klasifikasi subyek masalah (*Index Folio*), pengendalian surat masuk/keluar (*controleboeken/authoriteiten*) maupun sarana temu balik kembalinama (*klapper*).

Sejak 1924, setiap instansi pemerintah Kerajaan Belanda termasuk koloninya harus menerapkan sistem agenda, dengan beberapa sarana pencatatan surat masuk dan keluar berdasarkan kode klasifikasi subjek (*Correspondentiekaart/kartu kaulbach*), pengendalian) maupun sarana temu balik kembali nama (*klapper*) dan instansi pengirim/penerima surat (*authoriteiten*).

Secara teoretis, buku *Hoofdenlijst* adalah sub seri penting yang tercipta dalam lingkungan sistem verbaal, namun sejauh ini tim belum menemukan arsip tersebut. Pada Inventaris Arsip Departement van Binnenlands Bestuur: Serie Toegangen 1849-1950, terdapat penambahan jenis arsip *Expeditie Boek* yang merupakan sarana pendistribusian surat. Berkenaan dengan tahapan pengerjaan yang masih berlangsung, riset sistem kearsipan khazanah *Binnenlandsch Bestuur* masih terus dilaksanakan.

Berikut ini adalah jenis dan periode arsip yang tercakup dalam inventaris ini:

a. Inkomende Agenda (1887-1941)

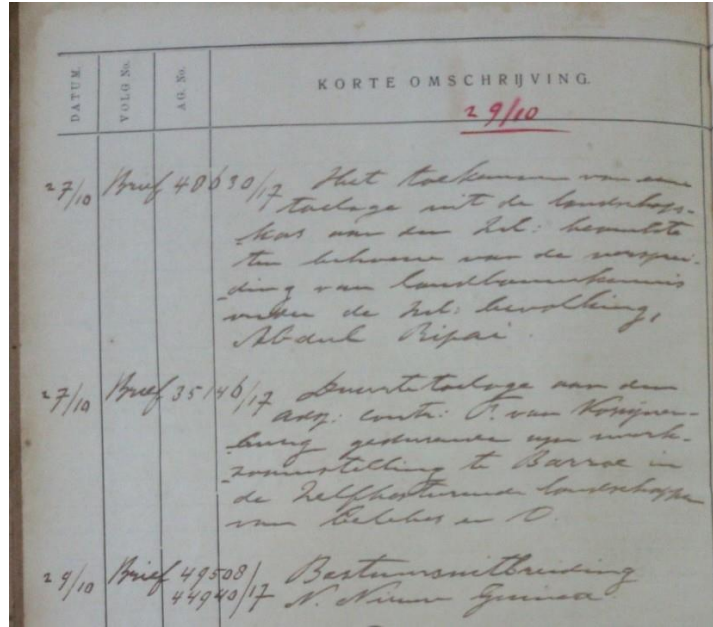
Adalah sarana pencatatan surat masuk secara kronologis dari nomor 1 dalam satu tahun berjalan.

Agenda Nnummer	Van Wien Ontvangen	KORTE INHOUD

Dengan elemen sebagai berikut

- Volg nummer* : Nomor urut,
- Agenda nummer* : Nomor agenda,
- Korte Omschrijving* : Uraian berkas

Berikut contoh Buku *Uitgaande Agenda*



Gambar 4
Contoh Buku *Uitgaande Agenda* Tahun 1917

c. In- en Uitgaande Agenda (1924-1942)

Buku agenda keluar masuk adalah pencatatan surat masuk dan keluar.

Door lopend Nummer	Agenda Nummer	Van Wien Ontvangen	Redacteur		Gedeponeerd op.	Ter disponeering	KORTE INHOUD
			Afgegeven	Afgedaan.			

Gambar 5
Format kolom *In- en uitgaande Agenda*

Dengan elemen sebagai berikut:

- Doorlopend nummer* : Nomor urut,
- Agenda nummer* : Nomor agenda,
- van wien ontvangen* : Asal surat,
- Redacteur* : Pelaksana pencatatan
- Afgegeven* : Tanggal penerimaan
- Afgedaan* : Tanggal keputusan
- Gedeponeerd op* : Tanggal diputuskan untuk disimpan
- Ter deponeering* : Tanggal di berkaskan
- Korte Inhoud* : Uraian singkat

d. Correspondentie kaarten (1924-1949)

Adalah jalan masuk utama penataan arsip sistem Agenda. Kartu Korespondensi (Kartu *Kaulbach*) adalah kartu terbuat dari kertas tebal bergaris yang telah diberikan nomor urut permanen 1-15. Setiap 50 kartu dijilid menurut pokok masalah, sehingga dalam satu tahun bisa menghasilkan beberapa bundel dengan pokok masalah yang sama.

Masing-masing pokok masalah dibagi-bagi lagi dengan urutan berdasarkan masing-masing dan tidak secara alfabetis. Pokok masalah diberi kode huruf-huruf besar, ada yang hanya satu dan ada yang lebih dan masalah diberi kode angka dan untuk arsip-arsip rahasia diberi tanda x di belakang tiap nomor kode (Parani, 1976).

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

ONDERWERP

KAART No.(Z.O.Z)

Volg No.	INKOMEND			KORTE INHOUD	In bewerking afdeling	UITGAAN		Kolom voor voorwijzingen
	Data	No.	Van			Data	Aan	

Gambar 6
Format kolom *Correspondentie kaart*

Dengan elemen sebagai berikut :

Volg nummer : Nomor urut telah terbagi menjadi 1-15
Inkomende : Data masuk yang meliputi
Data : Tanggal surat masuk
No. : *Nummer* /Nomor
Van : Sumber pengirim surat
Korte Inhoud : Ringkasan singkat isi arsip
In Bewerking Afd. : Unit kerja yang menangani
Uitgaan : Keterangan surat keluar yang terdiri dari data
Data : Tanggal surat keluar
Aan : Kepada siapa surat dikirim; dan kepada siapa dikirimkan
Kolom voor verwijzingen : Keterangan tambahan jika ada tunjuk silang

Diatas kartu terdapat beberapa istilah sebagai berikut:

Kaart No : Kode sub pokok masalah
Onderwerp : Nama sub pokok masalah
Z.O.Z : *zie onder zijde* lihat lembar berikutnya

Berikut contoh kartu korespondensi

Gambar 7

Contoh *Correspondentiekaart* *Afdeeling* A15 Tahun 1926

A15/1/1/1926

A : Pokok masalah (*agrarische zaken*)
 15 : Sub-masalah (*aanvragen eigendom*)
 1 : Nomor kartu (1)
 1 : Nomor urut entry (1)
 1926 : Tahun (1926)

e. Index (1891-1924)

Index adalah jalan masuk utama penataan arsip sistem verbaal yang terdiri dari kolom-kolom berisi tanggal-nomor keputusan, informasi surat masuk (tanggal-nomor-pengirim), isi ringkas masalah, dan keterangan/rujukan ke keputusan lain. *openbare Index dan Geheim Index* untuk arsip-arsip rahasia diberi tanda x di sampul bundel.

Index tidak disusun secara kronologis melainkan berdasarkan rubrik yang tertuang dalam *hoofdenlijst*, yang terdiri dari daftar subyek-subyek (klasifikasi arsip) untuk memudahkan penemuan kembali arsip pada masa dinamis.

Hoofd :

Folio :

DISPOSITIEN			INGEKOMEN STUKKEN			KORTE INHOUD	ANDERE VERRICHTINGEN
Maand en Jaar	Dag	No	AUTHORITEIT.	Dag	No		

Gambar 8

Format kolom Buku Indeks

Dengan elemen sebagai berikut :

<i>Dispositien</i>	: Disposisi meliputi
<i>Maand en Jaar</i>	: Bulan - Tahun
<i>Dag</i>	: Hari
<i>No.</i>	: <i>Nummer</i> /Nomor
<i>Ingekomen Stukken</i>	: Surat masuk
<i>Authoriteiten</i>	: Asal instansi surat masuk
<i>Dag</i>	: Hari
<i>No</i>	: <i>Nummer</i> /Nomor
<i>Korte Inhoud</i>	: Ringkasan singkat isi arsip
<i>Andere Verrichtingen</i>	: Keterangan tambahan jika ada tunjuk silang

Berikut contoh buku indeks :

1920

Model No. 3

Hoofd: *Europee ambtenaren en andere personeele zaken* Folio: *1436*

-SPISITEN		INGEKOMEN STUKKEN		KORTE INHOUD.	ANDERE VERRICHTINGEN
MAAND EN JAAR.	DAG. N°.	AUTORITEIT.	DAG. N°.		
<i>Brief. Jan 2 - 8/c =</i>	<i>80.949/9</i>			<i>Versuch van een... te steunado. B. g. <u>attracties om.</u> godelijke stelling van al het begr. zijn merksambden alsaan. te verbeuren e. g. afwijzend vorgekeerd.</i>	
<i>29-10-46. B.L.W. 2/1348</i>				<i>clardedeeling op beleg. afwissel. verrek of bontbed. persoon geest aanleiding heggf gege- wens kans aan te stellen tot udf. Boekhouder op technische afd. voor haren velen gelegenheden Dep't. B.L.W. ged.</i>	

Gambar 9

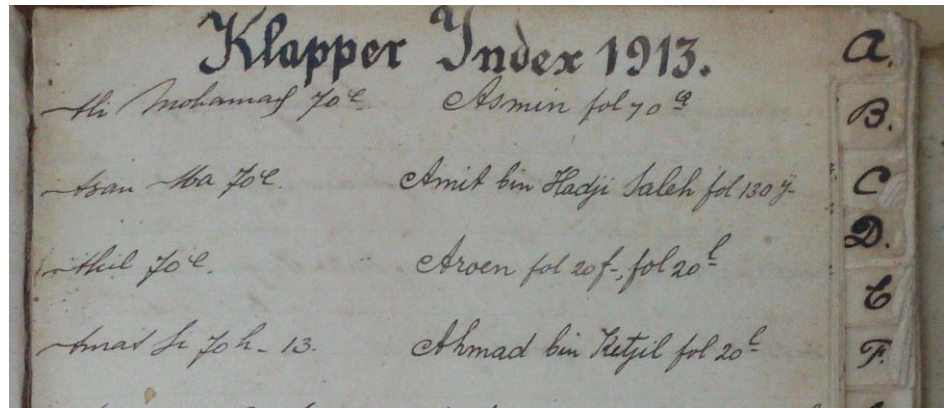
Contoh halaman dalam buku *Indeks Tahun 1920*

Indeks Tahun 1920

Hoofd : Europeese ambtenaren en andere personeele zaken
Folio 1436

f. Klapper

Klapper adalah daftar nama-nama pelaku (perorangan, lembaga perusahaan dan perkumpulan) yang terkait (dibicarakan, disebut, dicatat) dalam pencatatan surat masuk.



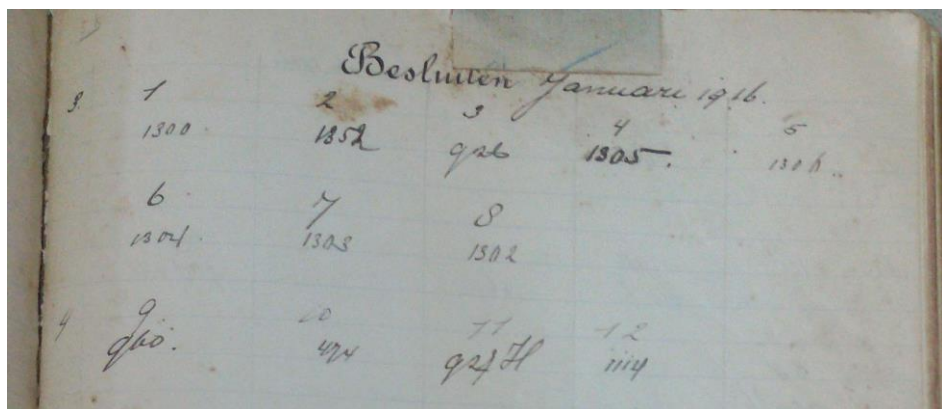
Gambar 10
Klapper Indeks Tahun 1913

g. Controleboek

Controle adalah buku kendali yang memuat nomor indeks yang dikelompokkan menurut kelompok masalah. Fungsi dari daftar tersebut adalah untuk mengendalikan surat masuk. *Controleboeken* terbatas kepada beberapa jenis surat terpenting, sebagai berikut:

- Besluiten* : Keputusan Gubernur Jenderal
- Rapporten* : Laporan-laporan
- Verbalen* : Surat Verbaal
- Telegrammen* : Telegram

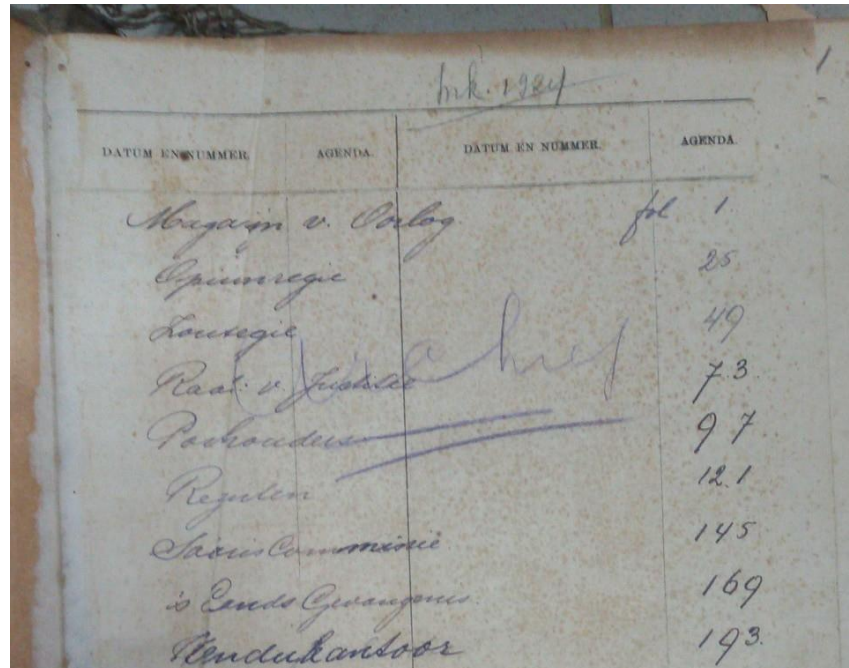
Berikut contoh buku kendali



Gambar 11
Contoh halaman *Controle Index* Tahun 1916

h. Register Inkomende Stukken (Autoriteiten)

Adalah catatan atau daftar nama asal instansi pengirim surat serta tanggal dan nomor dari pengirim surat. Nama-nama tersebut disusun secara alfanumerik. Setiap instansi telah ditentukan halamannya sesuai dengan *bladwijzer* (daftar isi) yang ada di halaman muka. (Puslitbang ANRI, 1991:14)



DATUM EN NUMMER	AGENDA	DATUM EN NUMMER	AGENDA
			fol 1
			25
			49
			73
			97
			121
			145
			169
			193

Gambar 12
Autoriteiten Tahun 1924

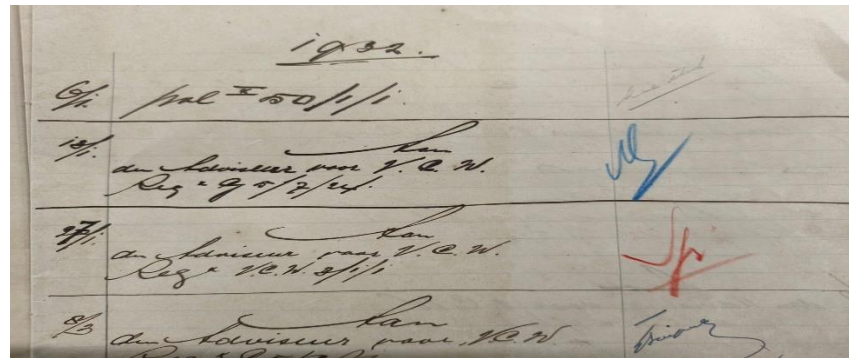
Masing-masing bundel terbagi menjadi beberapa jilid :

- Deel 1 Centrale
Autoriteiten
- Deel 2/3
Gewestelijke
Autoriteiten
- Deel 4 Andere
Autoriteiten

i. Expeditie Boek

Adalah buku yang digunakan untuk mencatat siapa yang

telah menerima surat keluar yang dikirimkan dari *afdeeling*. Format umum *Expeditie Boek* terdiri dari tanggal, nomor arsip, dan tanda tangan penerima.



Gambar 13

Expeditie Boek tahun 1932

1.4. Pertanggungjawaban Pembuatan Inventaris

Sesuai dengan tugas pokok Direktorat Pengolahan arsip yakni penyusunan sarana bantu temu kembali arsip berupa daftar arsip, inventaris dan guide, mulai tahun anggaran 2023. Kelompok Pengolahan Arsip III mendapatkan mandat untuk meningkatkan daftar arsip *Binnenlandsch Bestuur* menjadi inventaris. Tahapan pertama ditetapkan kegiatan mengolah *Serie Toegangen* sebanyak 168 ML yang terdiri dari arsip yang telah diolah (Daftar Arsip *Binnenlandsch Bestuur*, 2 jilid, 1988) maupun arsip yang belum diolah.

Tim pengolahan arsip *Binnenlandsch Bestuur Serie Toegangen* beranggotakan 5 (lima) orang Arsiparis dan satu orang penerjemah, yang terdiri dari Jajang Nurjaman, S.Hum, M.A. (Penanggung Jawab Teknis), Bertha Jayanti Nurtiana, S.Hum, Arsiparis Muda (Koordinator), Monica Imanuela Bendatu, S.S, Penerjemah Pertama (Sekretaris), Arshanti Kurnianingrum, S.Sos., Arsiparis Madya (anggota), Fahad Rizal Ilhamsyah, S.S., Arsiparis Pertama (anggota), Alfathan Wira Saputra, S.Hum, Arsiparis Pertama (anggota).

Proses penyusunan inventaris diupayakan mengikuti Peraturan Kepala ANRI Nomor 27 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Sarana Bantu Penemuan Kembali Arsip Statis, yang diawali dengan kegiatan persiapan yang meliputi kegiatan identifikasi arsip dan penyusunan rencana teknis kemudian dilanjutkan oleh kegiatan penelusuran, pengolahan, penulisan hingga finalisasi.

Kegiatan identifikasi adalah kegiatan untuk mengidentifikasi fisik khazanah volume, kondisi fisik, dan kurun waktu arsip agar dapat tersusun rencana kerja berisi matriks rencana waktu pengerjaan, biaya dan pelaksanaan kegiatan, serta penelusuran sumber dan referensi.

Kegiatan penelusuran berupa sumber dan referensi dititik beratkan pada riwayat arsip, arsip yang berkaitan, sejarah organisasi, tugas pokok dan fungsinya, serta perkembangan organisasinya. Selanjutnya, riset juga perlu dilakukan untuk mengetahui bagaimana sistem penataan arsip dan sistem penataan. dengan target draft pendahuluan dan penyusunan skema sementara.

Pengolahan arsip dilaksanakan melalui kegiatan deskripsi arsip dan penataan fisik arsip untuk mendapatkan representasi akurat antara informasi dan susunan fisik arsip; dilanjutkan dengan kegiatan pengolahan data yang dilaksanakan melalui penetapan skema definitif; manuver data dan fisik; labeling; hingga penataan arsip dalam boks;

Hasil deskripsi dituangkan dalam kegiatan penulisan inventaris dengan format baku sesuai dengan Perka ANRI. Tahapan finalisasi dilaksanakan melalui tahapan verifikasi bersama Direktorat Penyimpanan; validasi inventaris yang dilaksanakan oleh Direktur Pengolahan; terakhir distribusi inventaris pada unit terkait terutama Direktorat Pemanfaatan Arsip (Ruang Layanan Arsip ANRI)

1.5. Petunjuk Penggunaan

1.5.1. Petunjuk Penggunaan Arsip

Tidak ada persyaratan khusus untuk mengakses kandungan informasi dalam khazanah ini, selain pertimbangan kemampuan bahasa dan tulisan dari arsip dalam inventaris ini adalah mayoritas dalam bahasa Belanda.

1.5.2. Petunjuk Penggunaan Inventaris

Pengguna harus tetap mengingat bahwa inventaris ini adalah hasil tahapan pertama peningkatan daftar arsip *Binnenlands-Bestuur* (ANRI, 1988) yang telah berada di ruang Baca ANRI. Kegiatan difokuskan pada serie jalan masuk arsip *Binnenlandsch-Bestuur* baik yang telah tercantum dalam daftar arsip *Binnenlandsch-Bestuur* lama (ANRI, 1988) nomor 6137-6957), maupun arsip toegangen yang sama sekali belum diolah.

Unifikasi daftar arsip direncanakan akan diselesaikan dalam beberapa tahapan pekerjaan kedepan. Tahapan pertama nomor seri jalan masuk telah ditutup. Meskipun demikian Pengguna masih bisa mengakses arsip *Toegangen* Arsip *Binnenlandsch- Bestuur* dari daftar arsip lama melalui konkordan yang terlampir dalam inventaris ini.

Melalui Inventaris Arsip baru (ANRI, 2023), Pengguna disarankan untuk menggunakan bagian lampiran secara bersamaan dengan bagian uraian deskripsi untuk melihat pengaturan arsip secara utuh.

551	1929 CD 58-68
-----	---------------

Gambar 14

Contoh akses informasi dalam uraian deskripsi

Keterangan :

Nomor definitif 551

Uraian isi arsip 1929 CD 58-68

Tahun 1929
Kode CD 58-68

Dari informasi tersebut pengguna dapat mengurai kode tersebut dalam lampiran yang berisi daftar rubrik (*hoofdenlijst*) informasi mengenai afdeeling CD 58 sampai dengan CD 68. Untuk mengakses arsipnya, pengguna bisa merujuk Daftar Arsip lama.

CD

...

58. Bannelingen. (1930)
Pengasingan.
59. Benoemingsreglement en ranglijst. (1932)
Peraturan pengangkatan dan daftar pangkat.
60. Bestuurschool. (1932)
Sekolah pemerintahan.
61. Conduite staten. Stamboeken. (1935)
Daftar perilaku pegawai. Stambuk.

dst...

1.5.3. Ketentuan reproduksi arsip

Untuk ketentuan reproduksi arsip (penggunaan fotocopy maupun digitalisasi) pengguna disarankan berkonsultasi dengan petugas di ruang layanan arsip.

1.5.4. Petunjuk Kutipan Sumber Arsip

Penggunaan arsip sebagai sumber bisa mengikuti aturan sebagai berikut.

1. Versi lengkap:

Arsip Nasional Republik Indonesia, Jakarta, Arsip Binnenlands-Bestuur Serie Toegangen (1878-1949), Nomor Inventaris ..., Nomor Arsip ...

2. Versi singkat:

ANRI, Arsip Binnenlands-Bestuur Serie Toegangen (1878-1949), Nomor Inventaris ..., Nomor Arsip ...

BAB II

URAIAN INFORMASI ARSIP

2.1. Agenda

2.1.1. Inkomende Agenda

Adalah register surat masuk yang disusun secara kronologis, berisi informasi mengenai isi ringkas surat masuk yang dilengkapi dengan tanggal, nomor surat, lembaga pengirim serta rujukan tindak lanjut surat masuk.

	1866-1949
	33 bundel
	Baik
1	1866
2	1885
3	1894-1897
4	1896
5	1897
6	1910
7	1913
8	1913-1914
9	1919
10	1919
11	1919
12	1922
13	1923
14	1923
429	1925
15	1926
16	1928
17	1929
18	1941
19	1941

- 20 1941-1942
- 21 1946
- 22 1946
- 23 1948
- 24 1948
- 25 1948
- 26 1948
- 27 1949
- 28 1949
- 29 1949
- 30 1949
- 31 TT
- 32 TT

2.1.2. Uitgaande Agenda

Adalah register surat keluar yang disusun secara kronologis, berisi informasi mengenai isi ringkas surat keluar yang dilengkapi oleh tanggal, nomor surat, dan lembaga pengirim yang dituju.

1905-1947
20 bundel
Baik

- 33 1905
- 34 2 April-30 December 1912
- 35 1917
- 36 1918
- 37 1919-1920
- 38 1920
- 39 1921
- 40 1922
- 41 1923
- 42 1921-1924
- 43 1924-1925

- 44 1924-1925
- 45 1925
- 46 1926
- 47 1932
- 48 1930
- 49 1931
- 50 1934-1938
- 51 1935-1937
- 52 1947

2.1.3. In –en Uitgaande Agenda

Adalah register surat masuk dan keluar yang disusun secara kronologis, berisi informasi mengenai isi ringkas surat masuk dan keluar yang dilengkapi dengan tanggal, nomor surat, lembaga pengirim penerima surat.

1911-1938
5 bundel
Baik

- 53 1911
- 54 1932
- 55 1932-1937
- 56 1936-1937
- 57 1938

2.1.4. Correspondentiekaart

Adalah register surat masuk dan keluar yang ditata menurut pokok masalah. Pokok masalah diberi kode huruf besar. Kartu diberi kode angka dan untuk arsip-arsip rahasia diberi tanda x di belakang tiap nomor kode.

1930-1950
105 bundel
Baik

- 58 1939
- 59 2603

60 1942
61 1946
62 1947
63 1931
64 1950
65 1936
66 1946
67 1948
68 1948
69 1949
70 1949
71 1949
72 1950
73 1948
74 1948
75 1949
76 1949
77 1949
78 1949-1950
79 1937
80 1938
81 1940
82 1942
83 1930
84 1932
85 1933
86 1933
87 1940
88 1940
89 1926
90 1931

91 1931
92 1935
93 1936
94 1946
95 1947
96 1948
97 1949
98 1942
99 1939
100 1946
101 1946
102 1946
103 1947
104 1947
105 1950
106 1946
107 1926
108 1946
109 1947
110 1940
111 1947
112 1939
113 1939
114 1946
115 1926
116 1930
117 1936
118 1937
119 1933
120 1940
121 1947

122 1947
123 1947
124 1947
125 1947
126 1948
127 1949
128 1949
129 1939
130 1946
131 1946
132 1946
133 1946
134 1947
135 1947
136 1947
137 1947
138 1947
139 1947
140 1947
141 1948
142 1948
143 1948
144 1948
145 1948
146 1949
147 1949
148 1949
149 1949
150 1949
151 1949
152 1949

153	1949
154	1949
155	1949
156	1947
157	1948
158	1949
159	1937
160	1938
161	1939
162	1940

2.2. Index

Adalah register surat masuk dan keluar yang berisi informasi secara kronologis mengenai isi ringkas surat masuk yang dilengkapi oleh tanggal, nomor surat, lembaga pengirim yang dituju.

1910-1940
20 bundel
Baik

163	1910
164	1913-1914
165	1915-1916
166	1919
167	1921
168	1921
169	1922
170	1922
171	1925
172	1925
173	1926
174	1927
175	1930
176	1931

177	1932
178	1934
179	1935
180	1937
181	1937-1940
182	1940

2.3. Klapper

Klapper adalah daftar nama-nama pelaku (perorangan, lembaga perusahaan dan perkumpulan) yang terkait (dibicarakan, disebut, dicatat) dalam pencatatan surat masuk.

1895-1950
26 bundel
Baik

2.3.1. Klapper Index

183	1895
184	1902
185	1912-1930
186	1912
187	1931-1932
188	1934-1935
189	1938
190	1940-1941
191	1941
192	1942
193	1946
194	1947
195	1947
196	1949
197	1949
198	TT
199	TT

200 TT

201 TT

2.3.2. Agenda Klapper

202 1902

203 1938

204 1946

205 TT

206 TT

207 TT

208 TT

2.4. Controleboeken

Adalah buku kendali yang memuat nomor indeks yang dikelompokkan menurut kelompok masalah. Fungsi dari daftar tersebut adalah untuk mengendalikan surat masuk.

1917-1950

51 bundel

Baik

2.4.1. Controle Agenda

229 1917-1918

230 1919

231 1903-1923

2.4.2. Controle Index

232 1861

233 1946

2.4.3. Autoriteiten

209 1917

210 1920

211 1925

212 1932-1933

213 1932-1936
214 1934
215 1935
216 1947
217 1947
218 1947
219 1947
220 1947
221 1948
222 1948
223 1948
224 1946-1949
225 1949
226 1950
227 1950
228 1951

2.4.4. Register Antwoord

234 1849-1911
235 1906
236 1913-1915
237 1917
238 1922-1923
239 1923-1924
240 1924
241 1924-1925
242 1925
243 1926
244 1926-1927
245 1928
246 1928

247	1929
248	1930
249	1931
250	1931-1938
251	1932
252	1933
253	1934-1935
254	1934-1937
255	1935
256	1937
257	1937-1939
258	1939
259	1948

2.5. Expeditie Boek

Adalah buku yang digunakan untuk mencatat siapa yang telah menerima surat keluar yang dikirimkan dari afdeeling. Format umum Expeditie Boek terdiri dari tanggal, nomor arsip, dan tanda tangan penerima.

169 bundel
1918-1947
Baik

2.5.1. Afdeeling A

260	1918
261	1924
262	1927
263	1928
264	1929
265	1931
266	1935
267	1936
268	1937

2.5.2. Afdeeling AI

269 1928

2.5.3. Afdeeling AJ

270 1927

271 1931

272 1932

273 1935

274 1936

275 1937

2.5.4. Algemeene Politie

276 1918

277 1930-1933

2.5.5. Afdeeling AVB

278 1935

279 1936

280 1937

2.5.6. Afdeeling B

281 1918

282 1926

283 1927

284 1928

285 1931

286 1935

287 1936

288 1936

289 1937

290 1937

291 1938

2.5.7. Afdeeling BG

292 1927

293 1928

294 1929

295 1932

296 1935

297 1935

298 1936

299 1936

300 1936

301 1936

302 1937

303 1937

304 1938

305 1938

306 1938

2.5.8. Afdeeling BR

307 1935

308 1936

309 1938

2.5.9. Afdeeling BTB

310 1918

2.5.10. Afdeeling C1

311 1918

2.5.11. Afdeeling C2

312 1918

2.5.12. Afdeeling C

313 1926

314 1927

315 1928

2.5.13. Afdeeling CD

316 1932

317 1936

318 1934

319 1935

320 1936

321 1936

322 1936

323 1936

324 1936

325 1937

326 1937

327 1938

328 1938

329 1938

2.5.14. Afdeeling CK

330 1927

331 1929

332 1932

2.5.15. Afdeeling CZ

333 1927

334 1931

335 1932

2.5.16. Afdeeling D

336 1927
337 1928
338 1929
339 1931
340 1932
341 1933
342 1935
343 1936
344 1937
345 1938

2.5.17. Afdeeling Diversen

346 1927
347 1932
348 1938

2.5.18. Afdeeling E

349 1927
350 1931
351 1932
352 1934
353 1935
354 1936

2.5.19. Afdeeling F

355 1927
356 1928
357 1931
358 1935
359 1936
360 1937

2.5.20. Afdeeling Gewapende Politie

361 1918

2.5.21. Afdeeling H

362 1937

2.5.22. Afdeeling Japansche Zaken

363 1927

2.5.23. Afdeeling MAT

364 1938

2.5.24. Afdeeling MP

365 1929

366 1931

367 1932

368 1935

369 1936

370 1937

2.5.25. Afdeeling OAZ

371 1936

372 1937

373 1938

2.5.26. Afdeeling Politie

374 1920

375 1924

376 1927

377 1928

378 1930

379 1931

380 1931

381 1932-1935
382 1932
383 1932
384 1935
385 1936
386 1936
387 1936
388 1937
389 1937
390 1938
391 1938

2.5.27. Afdeeling R

392 1909-1912

2.5.28. Afdeeling SAL

393 1927

2.5.29. Afdeeling VCW

394 1927

395 1927

396 1929

397 1932

2.5.30. Unidentified Afdeeling

398 1917

399 1917-1918

400 1919

401 1920

402 1921

403 1923

404 1923

405 1924
406 1927-1928
407 1927-1931
408 1928
409 1928
410 1931
411 1932
412 1932
413 1933
414 1934
415 1937
416 1937
417 1937
418 1938
419 1938
420 1937-1938
421 1938
422 1938
423 1938
424 1939
425 1940
426 1941-1942
427 1947
428 1947

PENUTUP

Penyusunan Inventaris Arsip *Departement van Binnenlandsch Bestuur: Seri Toegangen* 1849-1950 sebagai sarana bantu penemuan kembali arsip statis yang tersimpan di Arsip Nasional Republik Indonesia disusun secara sistematis, sehingga informasi arsip dalam inventaris arsip ini dapat diakses dan dimanfaatkan untuk kepentingan publik secara mudah, cepat, tepat, dan lengkap.

Sebagai sarana bantu penemuan kembali arsip statis, inventaris arsip ini disusun melalui proses kerja pengolahan arsip statis yang memegang teguh azas/prinsip pengolahan arsip statis dan tahapan kerja yang tepat sesuai dengan SOP AP Pengolahan, ANRI.

Harapan penyusun semoga inventaris arsip ini dapat membantu pengguna arsip dalam mencari arsip *Departement van Binnenlandsch Bestuur: Seri Toegangen* 1849-1950. Segala masukan atas segala kekurangan yang terdapat dalam inventaris arsip ini akan diterima sebagai masukan untuk penyempurnaan selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Arsip Nasional RI (ANRI). 1988. *Daftar Arsip Binnenlands-Bestuur*. 2 jilid. Jakarta: Arsip Nasional Republik Indonesia
- ANRI. 1990. *Sistem Kearsipan Zaman Hindia Belanda*, Jakarta: Puslitbang ANRI. 2011. *Inventaris Burgerlijke Openbare Werken (Toegangen)*. 1914-1942. Jakarta: Arsip Nasional Republik Indonesia.
- ANRI. 2012-2014. *Inventaris Algemene Secretarie*. Jakarta: Direktorat Pengolahan ANRI.
- ANRI. 2013. *Inventaris Arsip Java's Noordoost Kust*. 1694-1816. Jakarta: Arsip Nasional Republik Indonesia.
- ANRI. 2016. *Inventaris Arsip Departement van Binnenlandsch Bestuur: Serie Toegangen (2015-2016)*.
- ANRI. 2017. *Inventaris Arsip Departement van Binnenlandsch Bestuur: Seri Rubrieken Agenda (Afdeeling A) (2017)*.
- ANRI. 2018. *Inventaris Arsip Departement van Binnenlandsch Bestuur: Afdeeling AB, AD, AE, AI, C, D, dan CD (Sistem Kaulbach) (1924-1942) (2018)*.
- ANRI. 2019. *Inventaris Arsip Departement van Binnenlandsch Bestuur: Afdeeling E (1924-1944) (2019)*.
- ANRI. 2020. *Inventaris Arsip Departement van Binnenlandsch Bestuur: Afdeeling Pol (1925-1942) (2020)*.
- ANRI. *Sekilas Binnenlands Bestuur*. Jakarta: PNSAP ANRI
- Anrooij, Francien van. 2009. *De koloniale staat 1854-1942; Gids voor het archief van het ministerie van Koloniën; De Indonesische archipel*. Den Haag: Nationaal Archief.
- Encyclopaedie van Nederlandsch-Indië*. 's-Gravenhage en Leiden: Martinus Nijhoff en E.J. Brill, 4 delen en 4 supplementen, 1917-1939.
- Daryan, Yayan 1998. *Terminologi Kearsipan Indonesia*. Jakarta: PT. Sigma Cipta Utama
- Dick, Howard W.(Ed.) 2002. *The Emergence of a National Economy: An Economic History of Indonesia, 1800-2000*. Southeast Asia publicationsseries. University of Hawaii Press.
- Doel, H.W. van den. 1994. *De Stille Macht, Het Europese binnenlands bestuur 1808-1942*, Amsterdam: Bert Bakker.
- Dutch East Indies. 1883-1942. *Regerings Almanak van Nederlandsch Indië*. Batavia: Landsdrukkerij.

- Fasseur, Cees. 2003, *De Indologen, Ambtenaren voor de Oost 1825-1950*, 3deeditie. Amsterdam: Bert Bakker.
- Handinoto. 2015. *Perkembangan Kota di Jawa Abad XVIII Sampai Pertengahan Abad XX: Dipandang dari Sudut Bentuk dan Struktur Kebudayaan*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Kramer, R., Tempelaar, A.M. 1990. *Handleiding voor Historisch Onderzoek in het archief van de Algemene Secretarie en Voorgangers, 1816-1942*. Jakarta: Arsip Nasional Republik Indonesia
- Muljana, Slamet. 2008. *Kesadaran Nasional dari Kolonialisme Sampai Kemerdekaan*. Yogyakarta: P.T. LKis Pelangi Aksara Yogyakarta.
- Niel, Robert van. 1970. *A Survey of Historical Source Materials in Java and Manila*. Hawaii: Asian Studies Program University of Hawaii.
- Otten, F.J.M. 2004. *Gids Voor de Archieven van de Ministeries en de Hoge Colleges van Staat 1813-1940*. Den Haag: Instituut voor Nederlandse Geschiedenis.
- Paulus, Mr. Dr. J. 1917-1939. *Encyclopædie van Nederlandsch-Indië*. 's-Gravenhage en Leiden: Martinus Nijhoff en E.J. Brill.
- Pelzer, Karl. 1985. *Toean Keboen dan Petani. Politik Kolonial dan Perjuangan Agraria*. (terj.) Jakarta: Sinar Harapan.
- Raffles, Thomas Stamford. *The History of Java*. 2014. Yogyakarta: Penerbit Narasi.
- Ricklefs, M.C. 2005. *Sejarah Indonesia Modern 1200-2004*. Jakarta: Serambi.
- Schie, H.A.J. 1991. *Registratur van Nederlandse Overheids-Administratie in de Negentiende Eeuw*. 's-Gravenhage: Rijksarchiefschool.
- Schie, H.A.J. 1991. *Registratur van Nederlandse Overheids-Administratie in de Negentiende Eeuw*. 's-Gravenhage: Rijksarchiefschool
- Suparman, Eman. 2018. *Hukum Perselisihan ("Conflictenrecht"): Pertautan Sistem Hukum dan Konflik Kompetensi dalam Pluralisme Hukum Bangsa Pribumi*. Jakarta: Kencana.
- Sutherland, Heather. 1983. *Terbentuknya Sebuah Elite Birokrasi*. Jakarta: Penerbit Sinar Harapan.
- Tempelaars, A.M., M.G.H.A. de Graaff. 1990. *Inventaris van het archief van de Algemene Secretarie van de Nederlands-Indische Regering en de daarbij Gedeponeerde archieven, (1922) 1944-1950*. Den Haag: Nationaal Archief.
- Vlekke, Bernard. H.M. 2014. *Nusantara Sejarah Indonesia*. Jakarta:

Kepustakaan Populer Gramedia

Wertheim, W.F. 1999. Masyarakat Indonesia dalam Transisi, Kajian Perubahan Sosial. Yogyakarta: P.T. Tiara Wacana.

Zanden, Jan Luiten van, Daan Marks.2012. Ekonomi Indonesia 1800-2010: Antara Drama dan Keajaiban Pertumbuhan. Jakarta: Penerbit Buku Kompas dan KITLV-Jakarta.

_____. 1929, *Staatsinstellingen van Nederlandsch-Indië* (tweede deel), Amsterdam: J.H. de Bussy.

Jurnal:

Abdul Wahid. 2015. "The Dutch's 'Floating Life' On Deshima Island: A Gloomy Side Of Dutch-Japan Relationship During The Tokugawa Periode, 1715-1790". *Jurnal Kajian Wilayah Vol.6 No.1, 2015*. Jakarta: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.

Regulasi Formal

- 1 Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. Pemerintah Indonesia. Jakarta.
- 2 Republik Indonesia. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Sarana Bantu Penemuan Kembali Arsip Statis. ANRI. Jakarta.
- 3 Republik Indonesia. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Standar Deskripsi Arsip Statis. ANRI. Jakarta.
- 4 Republik Indonesia. Standar Operasional Prosedur Aparatur Pemerintah (SOP AP) di Lingkungan Direktorat Pengolahan. Direktorat Pengolahan ANRI. Jakarta.